

LAMPIRAN INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 17 Tahun 2011  
TANGGAL : 19 Desember 2011

AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI TAHUN 2012

| No                                                   | Isu/<br>Strategi<br>Nasional | Aksi                                                                                                           | Keluaran                                                                                                                                                                                                                             | Target<br>Penyelesaian | Sasaran                                                                                                                                                                                       | Instansi<br>Penanggung<br>Jawab      | Instansi<br>Terkait |
|------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
|                                                      | (1)                          | (2)                                                                                                            | (3)                                                                                                                                                                                                                                  | (4)                    | (5)                                                                                                                                                                                           | (6)                                  | (7)                 |
| STRATEGI PENCEGAHAN                                  |                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                                                                                                                                                                               |                                      |                     |
| Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi |                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                                                                                                                                                                               |                                      |                     |
| 1                                                    |                              | Pelaksanaan penanganan perkara yang transparan dan akuntabel sesuai revisi Peraturan KaPolri No. 12 Tahun 2009 | Terbangunnya sistem penanganan perkara berbasis TI dari Bareskrim Polri sampai dengan Ditreskrim Polda, Polres dan Polsek yang dapat diakses oleh masyarakat, dengan target 25% dari jumlah Polres dan Polsek yang ada pada saat ini | April 2012             | Peningkatan transparansi dan akuntabilitas publik dalam penanganan perkara pidana sesuai dengan Revisi Peraturan KaPolri No. 12 Tahun 2009 di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia | Kepolisian Negara Republik Indonesia | Sekjen Ombudsman RI |
|                                                      |                              |                                                                                                                | Tersosialisasikannya sistem penanganan perkara berbasis TI kepada Polda, Polres, dan Polsek percontohan                                                                                                                              | Juni 2012              |                                                                                                                                                                                               |                                      |                     |
|                                                      |                              |                                                                                                                | Terlaksananya sistem penanganan perkara yang dapat diakses oleh masyarakat secara terbatas pada Polda, Polres, Polsek percontohan                                                                                                    | Juli 2012              |                                                                                                                                                                                               |                                      |                     |

| No | Isu/<br>Strategi<br>Nasional | Aksi                                                                                                    | Keluaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Target<br>Penyelesaian | Sasaran                                                                                                                                                                              | Instansi<br>Penanggung<br>Jawab      | Instansi<br>Terkait |
|----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
|    | (1)                          | (2)                                                                                                     | (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (4)                    | (5)                                                                                                                                                                                  | (6)                                  | (7)                 |
|    |                              |                                                                                                         | Persentase penanganan perkara yang terdokumentasikan dalam sistem penanganan perkara yang berbasis TI                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Desember 2012          |                                                                                                                                                                                      |                                      |                     |
| 2  |                              | Pelaksanaan transparansi, dan akuntabilitas layanan publik di lingkungan Kepolisian                     | <p>Terpublikasinya informasi publik melalui <i>website</i> Polri dan papan pengumuman di seluruh Indonesia, antara lain terdiri dari:</p> <p>a. Profil Organisasi dan SDM, struktur organisasi dan tugas/fungsi unit, nama pejabat dan kontak pejabat yang dapat dihubungi</p> <p>b. Penegakan hukum, pelayanan publik dan penjagaan ketertiban, dan informasi wajib lainnya sesuai dengan ketentuan KIP</p> | Juni 2012              | Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik sesuai tugas dan fungsi kepolisian                                                                                 | Kepolisian Negara Republik Indonesia |                     |
| 3  |                              | Pelaksanaan pelayanan paspor yang cepat, mudah, transparan dan tepat waktu dan bebas dari pungutan liar | 100% kantor imigrasi yang sudah dapat melayani pemberian paspor dalam waktu 4 (empat) hari setelah pengambilan foto pemohon dan bebas dari pungutan liar                                                                                                                                                                                                                                                     | Desember 2012          | Pelayanan pembuatan paspor menjadi mudah, murah, cepat, transparan dan tepat waktu dari mulai proses awal sampai terbit paspor sehingga dapat meminimalisir terjadinya pungutan liar | Kementerian Hukum dan HAM            |                     |

| No | Isu/<br>Strategi<br>Nasional | Aksi                                                                                                     | Keluaran                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Target<br>Penyelesaian | Sasaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Instansi<br>Penanggung<br>Jawab                           | Instansi<br>Terkait      |
|----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|
|    | (1)                          | (2)                                                                                                      | (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (4)                    | (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (6)                                                       | (7)                      |
| 4  |                              | Pelaksanaan administrasi hukum perdata dan administrasi badan hukum yang transparan dan akuntabel        | Terpublikasinya Berita Negara (BN), tambahan Berita Negara (TBN) dan layanan permohonan badan hukum diumumkan secara tepat waktu melalui situs yang dapat diakses oleh masyarakat                                                                                                                    | Desember 2012          | Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pelayanan informasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM                                                                                                                                                                                                                         | Kementerian Hukum dan HAM                                 |                          |
| 5  |                              | Penguatan pertukaran data perpajakan dan dokumen ekspor dan impor antara DJP dan DJBC                    | Terbangun dan termanfaatkannya sistem pertukaran data dokumen ekspor, impor dan perpajakan antara DJP dan DJBC dalam perhitungan bea cukai dan perpajakan                                                                                                                                            | Juli 2012              | Penggunaan data ekspor impor yang sama ( <i>unified data</i> ) dalam perhitungan bea cukai dan pajak oleh DJP dan DJBC sebagai upaya pencegahan korupsi di lingkungan DJP dan DJBC                                                                                                                                             | Kementerian Keuangan                                      |                          |
| 6  |                              | Pelaksanaan <i>whistle blower system</i> pada Instansi pemerintah dalam proses pengadaan barang dan jasa | <ol style="list-style-type: none"> <li>Jumlah K/L dan Pemda (Prov/Kab/Kota) yang memiliki <i>whistle blower system</i> dalam proses pengadaan barang dan jasa</li> <li>Tersedianya <i>whistle blower system</i> yang dapat dimanfaatkan oleh K/L dan Pemda pada portal pengadaan nasional</li> </ol> | April 2012             | <ol style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan sistem pengawasan yang memberikan perlindungan kepada <i>whistle blower</i> dalam rangka pemberantasan korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa</li> <li>Mendorong pengungkapan penyimpangan/penyalahgunaan kewenangan dalam proses pengadaan barang dan jasa</li> </ol> | Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) | Kementerian Dalam Negeri |

| No | Isu/<br>Strategi<br>Nasional | Aksi                                                                                                                | Keluaran                                                                                                                                                                                                            | Target<br>Penyelesaian | Sasaran                                                                                                                                                                                                                                 | Instansi<br>Penanggung<br>Jawab                                                                       | Instansi<br>Terkait |
|----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|    | (1)                          | (2)                                                                                                                 | (3)                                                                                                                                                                                                                 | (4)                    | (5)                                                                                                                                                                                                                                     | (6)                                                                                                   | (7)                 |
|    |                              |                                                                                                                     | Evaluasi terhadap <i>whistle blower system</i> di K/L dan Pemda dalam proses pengadaan barang dan jasa                                                                                                              | Desember 2012          | Peningkatan efektivitas sistem pengawasan yang memberikan perlindungan kepada <i>whistle blower</i> dalam rangka pemberantasan korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa                                                              | LKPP                                                                                                  |                     |
| 7  |                              | Pelaksanaan <i>whistle blower system</i> di lingkungan DJBC yang terintegrasi dengan sistem di Kementerian Keuangan | Tertanganinya seluruh pengaduan <i>whistle blower</i> yang telah diverifikasi sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Tata Cara Penerimaan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat pada DJBC | Desember 2012          | 1. Peningkatan sistem pengawasan yang memberikan perlindungan kepada <i>whistle blower</i> dalam rangka pemberantasan korupsi di lingkungan DJBC<br>2. Mendorong pengungkapan penyimpangan/penyalahgunaan kewenangan di lingkungan DJBC | Kementerian Keuangan                                                                                  |                     |
| 8  |                              | Pelaksanaan pelayanan perizinan secara <i>online</i> dan keterbukaan informasi status perizinan                     | Tersedianya sistem pelayanan perizinan secara <i>online</i> yang dapat diakses oleh masyarakat                                                                                                                      | Juni 2012              | Peningkatan kemudahan masyarakat dan pelaku dunia usaha dalam pengurusan perizinan dengan minimal <i>human interaction</i>                                                                                                              | Kementerian Lingkungan Hidup,<br>Kementerian Kehutanan,<br>Kementerian Perdagangan,<br>Kemenakertrans |                     |

| No | Isu/<br>Strategi<br>Nasional | Aksi                                                                                     | Keluaran                                                                                                                                                                                   | Target<br>Penyelesaian | Sasaran                                                                                                                                                                                                                                  | Instansi<br>Penanggung<br>Jawab                                                              | Instansi<br>Terkait |
|----|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|    | (1)                          | (2)                                                                                      | (3)                                                                                                                                                                                        | (4)                    | (5)                                                                                                                                                                                                                                      | (6)                                                                                          | (7)                 |
|    |                              |                                                                                          | Tersedianya publikasi informasi secara <i>online</i> mengenai pengurusan perizinan tertentu, status permohonan perizinan serta izin yang telah diterbitkan (berserta dokumen pendukungnya) | Juni 2012              | Peningkatan transparansi dan akuntabilitas terhadap informasi dan status perizinan sesuai tahapan yang ditentukan, termasuk antara lain:<br>1. Jenis layanan dan mekanisme<br>2. Besar biaya dan lama waktu<br>3. Status proses aplikasi | Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Kementerian Perdagangan, Kemenakertrans |                     |
| 9  |                              | Penerapan Sistem Pelayanan Informasi dan perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) | Termanfaatkannya sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi berbasis TI di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)                                                                     | Desember 2012          | Peningkatan kemudahan masyarakat dan pelaku dunia usaha dalam pengurusan perizinan investasi dengan minimal <i>human interaction</i>                                                                                                     | Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)                                                      |                     |
| 10 |                              | Pelaksanaan transparansi layanan perizinan usaha di daerah                               | Jumlah Provinsi, Kabupaten dan kota yang telah memiliki PTSP mempublikasikan informasi perizinan                                                                                           | Desember 2012          | Peningkatan transparansi dan akuntabilitas terhadap informasi dan layanan di PTSP yang meliputi:<br>1. Jenis layanan dan mekanisme<br>2. Besar biaya dan lama waktu<br>3. Status proses aplikasi                                         | Kementerian Dalam Negeri                                                                     |                     |

| No | Isu/<br>Strategi<br>Nasional | Aksi                                                                | Keluaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Target<br>Penyelesaian | Sasaran                                                                                                                                                                                                                          | Instansi<br>Penanggung<br>Jawab | Instansi<br>Terkait                                      |
|----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|
|    | (1)                          | (2)                                                                 | (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (4)                    | (5)                                                                                                                                                                                                                              | (6)                             | (7)                                                      |
| 11 |                              | Pelaksanaan transparansi proses Pengadaan Badan Publik Pemerintah   | Semua K/L dan Pemda (Prov/Kab/Kota) melaksanakan pengadaan barang/jasa menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), dengan mendirikan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di K/L atau Pemda masing-masing, atau bergabung dengan LPSE terdekat. Sehingga, terbentuk satu LPSE Nasional | Desember 2012          | Dalam APBN/APBD tahun 2012, sekurang-kurangnya 75 % dari seluruh belanja K/L dan 40 % belanja Pemda (Prov/Kab/Kota) yang dipergunakan untuk pengadaan barang/jasa wajib menggunakan SPSE melalui LPSE sendiri atau LPSE terdekat | LKPP                            | Seluruh K/L, Pemerintah Daerah                           |
| 12 |                              | Pelaksanaan transparansi dan partisipasi dalam proses rekrutmen PNS | Jumlah K/L dan Pemda yang mempublikasikan proses rekrutmen PNS pada <i>website</i> masing-masing yang terintegrasi dengan <i>website</i> KemenPAN dan RB                                                                                                                                                | Desember 2012          | Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses rekrutmen PNS                                                                                                                                                            | KemenPAN dan RB                 | Seluruh K/L, Pemerintah Daerah, Kementerian Dalam Negeri |
|    |                              |                                                                     | Terbangunnya mekanisme pengaduan masyarakat dalam proses rekrutmen PNS                                                                                                                                                                                                                                  | Juni 2012              |                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                          |
|    |                              |                                                                     | Tersedianya hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan hasil rekrutmen PNS                                                                                                                                                                                                                               | Desember 2012          |                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                          |
| 13 |                              | Peningkatan transparansi dan akuntabilitas transportasi kereta api  | Terpublikasinya Rencana Strategis (Renstra) 2010-2014 Bidang Perkeretaapian dan standar pelayanan publik (SPM angkutan orang dengan KA) melalui <i>website</i> di lingkungan Kementerian Perhubungan                                                                                                    | Desember 2012          | Pengelolaan transportasi kereta api yang transparan dan akuntabel sebagai salah satu layanan publik                                                                                                                              | Kementerian Perhubungan         | BPK, Kementerian BUMN                                    |

| No | Isu/<br>Strategi<br>Nasional | Aksi                                                          | Keluaran                                                                                                                                                                                                               | Target<br>Penyelesaian | Sasaran                                                   | Instansi<br>Penanggung<br>Jawab | Instansi<br>Terkait          |
|----|------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
|    | (1)                          | (2)                                                           | (3)                                                                                                                                                                                                                    | (4)                    | (5)                                                       | (6)                             | (7)                          |
| 14 |                              | Peningkatan<br>transparansi<br>pengelolaan anggaran<br>negara | Terpublikasinya pemanfaatan PSO dan laporan triwulan melalui <i>website</i>                                                                                                                                            | Desember 2012          |                                                           | Kementerian<br>BUMN             |                              |
|    |                              |                                                               | Terpublikasinya hasil audit BPK secara berkala melalui <i>website</i>                                                                                                                                                  | Desember 2012          |                                                           | Kementerian<br>Perhubungan      | BPK                          |
|    |                              |                                                               | Terpublikasinya RAPBN, RKA-KL, APBN, DIPA, realisasi APBN seluruh K/L (triwulan, semester dan tahunan), Laporan audit APBN, data indikator dan alokasi anggaran DAU, DAK, DBH melalui <i>website</i> nasional Kemenkeu | Desember 2012          | Pengelolaan anggaran negara yang transparan dan akuntabel | Kementerian<br>Keuangan         |                              |
|    |                              |                                                               | Transparansi pendapatan negara dari pajak yang diuraikan secara per sektor                                                                                                                                             |                        |                                                           |                                 |                              |
|    |                              |                                                               | Terpublikasinya RAPBD, RKA-SKPD, APBD, DIPA Daerah, realisasi APBD seluruh SKPD, Laporan Audit APBD melalui <i>website</i> masing-masing Pemerintah Daerah                                                             | Desember 2012          | Pengelolaan anggaran daerah yang transparan dan akuntabel | Kementerian<br>Dalam Negeri     | Pemerintah<br>Daerah terkait |

| No | Isu/<br>Strategi<br>Nasional | Aksi                                                                            | Keluaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Target<br>Penyelesaian | Sasaran                                                                                             | Instansi<br>Penanggung<br>Jawab | Instansi<br>Terkait                  |
|----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
|    | (1)                          | (2)                                                                             | (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (4)                    | (5)                                                                                                 | (6)                             | (7)                                  |
|    |                              |                                                                                 | Terpenuhinya kriteria/formula dalam pengalokasian dana <i>ad-hoc</i> ke daerah (apabila terdapat dana optimalisasi APBN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Desember 2012          | Penggunaan anggaran dana optimalisasi APBN yang ditransfer ke daerah sesuai dengan kriteria/formula | Kementerian Keuangan            | Sekretariat DPR (Badan Anggaran DPR) |
| 15 |                              | Pelaksanaan transparansi, dan akuntabilitas layanan publik di lembaga peradilan | Tersedianya informasi yang wajib dipublikasikan melalui <i>website</i> lembaga peradilan, antara lain terdiri dari:<br>a. Profil Organisasi dan SDM, struktur organisasi dan tugas/fungsi unit, nama pejabat dan kontak pejabat yang dapat dihubungi<br>b. Informasi mengenai penanganan perkara, prosedur bantuan hukum, biaya yang dibebankan dan waktu yang dibutuhkan, dan lain-lain<br>c. Informasi penanganan perkara, publikasi putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap | Agustus 2012           | Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga peradilan           | Sekretariat MA                  |                                      |



| No | Isu/<br>Strategi<br>Nasional | Aksi                                                                                             | Keluaran                                                                                                                                                                       | Target<br>Penyelesaian | Sasaran                                                                                                                                                                          | Instansi<br>Penanggung<br>Jawab      | Instansi<br>Terkait        |
|----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
|    | (1)                          | (2)                                                                                              | (3)                                                                                                                                                                            | (4)                    | (5)                                                                                                                                                                              | (6)                                  | (7)                        |
| 16 |                              | Pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat terhadap proses penegakan hukum di lembaga peradilan | Tertanganinya seluruh pengaduan masyarakat yang telah diklarifikasi<br>Terpublikasinya penanganan terhadap pengaduan masyarakat di lembaga peradilan melalui <i>website</i> MA | Desember 2012          | Peningkatan kualitas pelayanan publik terkait penegakan hukum di lembaga peradilan                                                                                               | Sekretariat MA                       | Sekjen Ombudsman RI        |
| 17 |                              | Pelaksanaan Peraturan Kepala Kepolisian No.14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi POLRI         | Terbitnya Peraturan KaPolri tentang penegakan kode etik profesi Polri yang memuat tentang kelembagaan dan tata cara penegakan kode etik profesi Polri                          | Desember 2012          | Peningkatan upaya pencegahan terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum dan pengawasan terhadap kinerja Kepolisian dalam rangka pelayanan kepada masyarakat | Kepolisian Negara Republik Indonesia | Komisi Kepolisian Nasional |

| No | Isu/<br>Strategi<br>Nasional | Aksi                                                                                          | Keluaran                                                                                                                                                                  | Target<br>Penyelesaian | Sasaran                                                                                                                                                                                                                                                | Instansi<br>Penanggung<br>Jawab      | Instansi<br>Terkait |
|----|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
|    | (1)                          | (2)                                                                                           | (3)                                                                                                                                                                       | (4)                    | (5)                                                                                                                                                                                                                                                    | (6)                                  | (7)                 |
|    |                              |                                                                                               | Terselesaikannya jumlah laporan dan informasi tentang pelanggaran kode etik (tindak pidana korupsi) yang ditangani oleh Divisi Propam dan Kopolnas                        |                        | Peningkatan penyelesaian jumlah laporan dan informasi baik dari anggota Polri maupun masyarakat tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan oknum anggota Polri sebagai bentuk kepedulian masyarakat untuk mendukung percepatan pemberantasan korupsi |                                      |                     |
| 18 |                              | Pelaksanaan <i>whistle blower system</i> di lingkungan Propam, Mabes Polri, Polda, dan Polres | Tersusunnya mekanisme (SOP) perlindungan terhadap <i>whistle blower</i> bagi aparat Kepolisian                                                                            | April 2012             | Peningkatan perlindungan bagi <i>whistle blower</i> di lingkungan Propam, Mabes Polda, Polri, dan Polres                                                                                                                                               | Kepolisian Negara Republik Indonesia |                     |
|    |                              |                                                                                               | Tertanganinya pengaduan aparat petugas ( <i>whistle blower</i> ) mengenai pelanggaran disiplin atau pelanggaran hukum di lingkungan Propam, Mabes Polri, Polda dan Polres | Desember 2012          | Mendorong pengungkapan penyimpangan/penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan aparat Propam, Mabes Polri, Polda dan Polres                                                                                                                              |                                      |                     |

| No | Isu/<br>Strategi<br>Nasional | Aksi                                                                                                                                 | Keluaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Target<br>Penyelesaian | Sasaran                                                                                                                                                                                                          | Instansi<br>Penanggung<br>Jawab | Instansi<br>Terkait |
|----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|
|    | (1)                          | (2)                                                                                                                                  | (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (4)                    | (5)                                                                                                                                                                                                              | (6)                             | (7)                 |
| 19 |                              | Penyediaan <i>database</i> dakwaan penanganan perkara                                                                                | Tersusunnya database penyusunan dakwaan perkara penting dalam penanganan perkara yang dapat diakses secara internal Kejaksaan (intranet Kejaksaan)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | April 2012             | 1. Penguatan kapasitas Jaksa secara umum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.<br>2. Peningkatan kualitas kebijakan pimpinan Kejaksaan Agung<br>3. Peningkatan kualitas Pengawasan kinerja Jaksa Penuntut Umum | Kejaksaan Agung                 |                     |
| 20 |                              | Pelaksanaan transparansi informasi dan layanan publik di lingkungan kantor Kejaksaan dan penguatan pengawasan internal dan eksternal | Terpublikasinya informasi publik di Kejaksaan melalui <i>website</i> , meja informasi dan papan pengumuman di kantor Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang antara lain meliputi data-data:<br>a. Profil Organisasi dan SDM, struktur organisasi dan tugas/fungsi unit, nama pejabat dan kontak pejabat yang dapat dihubungi<br>b. Jenis layanan, mekanisme layanan (termasuk pengaduan), biaya yang dibebankan dan waktu yang dibutuhkan<br>c. Informasi perkembangan penanganan perkara pidana sejak tahap penuntutan, upaya hukum dan eksekusi yang menginformasikan antara lain: | Juni 2012              | Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan                                                                                                                                | Kejaksaan Agung                 |                     |

| No | Isu/<br>Strategi<br>Nasional | Aksi                                                                             | Keluaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Target<br>Penyelesaian | Sasaran                                                                                                                                                      | Instansi<br>Penanggung<br>Jawab | Instansi<br>Terkait |
|----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|
|    | (1)                          | (2)                                                                              | (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (4)                    | (5)                                                                                                                                                          | (6)                             | (7)                 |
|    |                              |                                                                                  | <p>pembatasan waktu, kriteria penggunaan upaya paksa, penelitian berkas perkara secara obyektif berdasarkan syarat formil maupun materil, pengelolaan barang bukti, dll</p> <p>d. Informasi dan status atas penanganan perkara, dakwaan yang telah dibacakan, publikasi jumlah kekayaan negara yang berhasil diselamatkan dan dikembalikan kepada Negara</p> |                        |                                                                                                                                                              |                                 |                     |
| 21 |                              | Pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap tugas dan fungsi Kejaksaan | Tersedianya <i>mapping proses</i> dan penyelesaian/ tindak lanjut pengaduan masyarakat                                                                                                                                                                                                                                                                       | Maret 2012             | 1. Peningkatan kualitas layanan publik terkait tugas dan fungsi kejaksaan<br>2. Berkurangnya potensi penyimpangan/penyalahgunaan kewenangan aparat kejaksaan | Kejaksaan Agung                 | Sekjen Ombudsman RI |
|    |                              |                                                                                  | Tertanganinya seluruh pengaduan masyarakat yang telah di verifikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Juni 2012              |                                                                                                                                                              |                                 |                     |
|    |                              |                                                                                  | Tersediannya <i>linked database</i> pengelolaan pengaduan antara Jamwas dan Komisi Kejaksaan                                                                                                                                                                                                                                                                 | September 2012         |                                                                                                                                                              |                                 |                     |

| No | Isu/<br>Strategi<br>Nasional | Aksi                                                                                              | Keluaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Target<br>Penyelesaian | Sasaran                                                                                                                                                                          | Instansi<br>Penanggung<br>Jawab | Instansi<br>Terkait |
|----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|
|    | (1)                          | (2)                                                                                               | (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (4)                    | (5)                                                                                                                                                                              | (6)                             | (7)                 |
| 22 |                              | Pelaksanaan pengelolaan database WBP di LAPAS/RUTAN sebagai bahan pengambilan kebijakan institusi | Tersedianya <i>database</i> informasi mengenai penghuni LAPAS/RUTAN secara bertahap melalui <i>website</i> Ditjen PAS yang terintegrasi dengan <i>website</i> UPT PAS, Kanwil Kemenkumham, dan Kemenkumham                                                                                                                                | Desember 2012          | Penanganan administrasi tahanan dan WBP sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan penyediaan informasi terkini yang akurat                                                     | Kementerian Hukum dan HAM       |                     |
| 23 |                              | Pelaksanaan transparansi data dan layanan Publik di lingkungan Pemasarakatan (LAPAS/RUTAN)        | Terbentuknya unit layanan informasi di UPT Pemasarakatan di seluruh Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                             | Desember 2012          | Peningkatan kualitas pengelolaan informasi yang dapat diakses publik, tahanan, WBP, keluarganya sehingga masyarakat dengan mudah memperoleh informasi mengenai hak-haknya di UPT | Kementerian Hukum dan HAM       | Sekjen Ombudsman RI |
|    |                              |                                                                                                   | Terpublikasinya Informasi antara lain terdiri dari:<br>a. Informasi mekanisme (SOP) mengenai proses cuti, proses pembebasan bersyarat, Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK), catatan perilaku penghuni LAPAS/tahanan, admisi dan orientasi layanan kunjungan, perawatan kesehatan di luar LAPAS/RUTAN, pemberian Remisi, dan lain-lain terkait | Desember 2012          | Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Pemasarakatan                                                                              | Kementerian Hukum dan HAM       |                     |

| No | Isu/<br>Strategi<br>Nasional | Aksi                                                                                                                                                                                                 | Keluaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Target<br>Penyelesaian | Sasaran                                                                                                                           | Instansi<br>Penanggung<br>Jawab | Instansi<br>Terkait |
|----|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|
|    | (1)                          | (2)                                                                                                                                                                                                  | (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (4)                    | (5)                                                                                                                               | (6)                             | (7)                 |
|    |                              |                                                                                                                                                                                                      | b. Informasi mengenai penghuni LAPAS/RUTAN (status hukuman dan lain-lain terkait)                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                                                                                                                                   |                                 |                     |
|    |                              |                                                                                                                                                                                                      | Tersusunnya kajian tentang penilaian berkelakuan baik WBP berbasis teknologi                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Desember 2012          | Peningkatan kualitas penilaian berkelakuan baik WBP yang berbasiskan teknologi informasi sehingga dapat mengurangi praktek pungli |                                 |                     |
| 24 |                              | Penguatan pengawasan internal di lingkungan Ditjen Pemasyarakatan dalam upaya mengawasi dan evaluasi perilaku dan kinerja termasuk penyimpangan/ pelanggaran yang dilakukan oleh petugas LAPAS/RUTAN | Tersedianya mekanisme (SOP) pengawasan internal di lingkungan Pemasyarakatan termasuk pelaksanaan evaluasi perilaku dan kinerja serta penyimpangan oknum petugas LAPAS/RUTAN<br><br>Terlaksananya monitoring dan evaluasi mekanisme pengawasan internal melalui <i>website</i> Ditjen PAS<br><br>Terpublikasinya hasil pengawasan internal di <i>website</i> Ditjen PAS | Agustus 2012           | Berkurangnya pelanggaran/penyimpangan perilaku aparat Pemasyarakatan                                                              | Kementerian Hukum dan HAM       | Sekjen Ombudsman RI |

| No | Isu/<br>Strategi<br>Nasional | Aksi                                                                                                                                           | Keluaran                                                                                                                                                                      | Target<br>Penyelesaian | Sasaran                                                                                                                 | Instansi<br>Penanggung<br>Jawab                     | Instansi<br>Terkait                                                                           |
|----|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | (1)                          | (2)                                                                                                                                            | (3)                                                                                                                                                                           | (4)                    | (5)                                                                                                                     | (6)                                                 | (7)                                                                                           |
| 25 |                              | Penguatan pengawasan eksternal melalui kerjasama dengan Ombudsman RI, Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komnas Anak, Satgas PMH, Hakim Wasmatdalam | Tersedianya mekanisme (SOP) pengawasan eksternal di lingkungan Pemasyarakatan termasuk pelaksanaan evaluasi perilaku dan kinerja serta penyimpangan oknum petugas LAPAS/RUTAN | Agustus 2012           | Berkurangnya pelanggaran/penyimpangan perilaku aparat Pemasyarakatan                                                    | Kementerian Hukum dan HAM                           | Sekjen Ombudsman RI, Satgas PMH, Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komnas Anak, Hakim Wasmatdalam |
|    |                              |                                                                                                                                                | Terlaksananya monitoring dan evaluasi mekanisme pengawasan eksternal di <i>website</i> Ditjen PAS                                                                             |                        |                                                                                                                         |                                                     |                                                                                               |
|    |                              |                                                                                                                                                | Terpublikasinya hasil pengawasan eksternal di <i>website</i> Ditjen PAS                                                                                                       |                        |                                                                                                                         |                                                     |                                                                                               |
|    |                              |                                                                                                                                                | Terlaksananya SIDAK secara acak (sesuai kebutuhan)                                                                                                                            | Desember 2012          | Berkurangnya penyimpangan yang dilakukan aparat dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang memberikan pelayanan Publik | Kementerian Hukum dan HAM serta Sekjen Ombudsman RI |                                                                                               |
| 26 |                              | Pelaksanaan <i>whistle blower system</i> di lingkungan LAPAS/RUTAN                                                                             | Tersedianya mekanisme perlindungan terhadap <i>whistle blower</i> bagi petugas di lingkungan aparat Pemasyarakatan                                                            | Desember 2012          | Mendorong upaya perbaikan dan meningkatkan peran dan fungsi pengawasan terhadap kinerja aparat Pemasyarakatan           | Kementerian Hukum dan HAM                           |                                                                                               |

| No | Isu/<br>Strategi<br>Nasional | Aksi                                                                                       | Keluaran                                                                                                                                                                                             | Target<br>Penyelesaian | Sasaran                                                                           | Instansi<br>Penanggung<br>Jawab | Instansi<br>Terkait             |
|----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|    | (1)                          | (2)                                                                                        | (3)                                                                                                                                                                                                  | (4)                    | (5)                                                                               | (6)                             | (7)                             |
|    |                              |                                                                                            | Penanganan yang responsif atas pengaduan aparat Pemasyarakatan ( <i>whistle blower</i> ) mengenai pelanggaran disiplin atau pelanggaran disiplin atau pelanggaran hukum di lingkungan Pemasyarakatan | Desember 2012          | Peningkatan perlindungan bagi <i>whistle blower</i> di lingkungan LAPAS/RUTAN     |                                 |                                 |
|    |                              |                                                                                            | Infrastruktur <i>whistle blower</i> (misal telepon khusus, kotak keluhan/surat, <i>complaint center</i> , pengaduan <i>online</i> ) yang dapat langsung ditujukan kepada pengawas Pemasyarakatan     | Desember 2012          | Tersedianya Infrastruktur <i>whistleblower</i> secara bertahap di LAPAS dan RUTAN |                                 |                                 |
| 27 |                              | Pelaksanaan pengawasan terhadap evaluasi kinerja tahunan pelayanan pejabat Rutan dan Lapas | Tersedia instrumen survei kinerja untuk mengukur kinerja fungsi pelayanan WBP yang disusun dengan melibatkan berbagai pihak terkait (a.l. KPK, Ombudsman RI dan pakar)                               | Mei 2012               | Peningkatan kualitas layanan LAPAS/RUTAN bagi WBP                                 | Kementerian Hukum dan HAM       | Sekjen Ombudsman RI, Sekjen KPK |



| No | Isu/<br>Strategi<br>Nasional | Aksi                                                                               | Keluaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Target<br>Penyelesaian | Sasaran                                                                                                                           | Instansi<br>Penanggung<br>Jawab | Instansi<br>Terkait |
|----|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|
|    | (1)                          | (2)                                                                                | (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (4)                    | (5)                                                                                                                               | (6)                             | (7)                 |
|    |                              |                                                                                    | Penyusunan Permenkumham tentang syarat dan tata cara pengangkatan jabatan kepala UPT Pemasarakatan tertentu yang memuat: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Syarat administratif dan substantif berupa pengajuan lamaran, pemaparan visi misi dan program dan kesediaan untuk menandatangani kontrak kinerja</li> <li>- Mekanisme pengangkatan jabatan</li> </ul> | Desember 2012          | Peningkatan integritas dan kualitas Kepala jabatan UPT Pemasarakatan melalui tata cara pengangkatan yang transparan dan akuntabel |                                 |                     |
| 28 |                              | Pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap tugas dan fungsi LAPAS/RUTAN | Tersedianya sarana pengaduan masyarakat dan proses pengelolaan pengaduan masyarakat secara responsif terhadap kinerja LAPAS/RUTAN                                                                                                                                                                                                                                       | Desember 2012          | Peningkatan kualitas layanan LAPAS/RUTAN                                                                                          | Kementerian Hukum dan HAM       | Sekjen Ombudsman RI |
|    |                              |                                                                                    | Tertanganinya seluruh pengaduan masyarakat yang telah diverifikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Desember 2012          |                                                                                                                                   |                                 |                     |

| No | Isu/<br>Strategi<br>Nasional | Aksi                                                                | Keluaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Target<br>Penyelesaian | Sasaran                                                                                | Instansi<br>Penanggung<br>Jawab | Instansi<br>Terkait |
|----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|
|    | (1)                          | (2)                                                                 | (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (4)                    | (5)                                                                                    | (6)                             | (7)                 |
| 29 |                              | Pelaksanaan transparansi Layanan Publik di lingkungan Keimigrasian. | Penguatan sistem informasi keimigrasian (SIMKIM) dalam rangka keterbukaan informasi keimigrasian yang antara lain memuat:<br>a. Profil Organisasi dan SDM, struktur organisasi dan tugas/fungsi unit, nama pejabat dan kontak pejabat yang dapat dihubungi<br>b. Jenis layanan Keimigrasian antara lain, mekanisme layanan paspor dan lainnya (termasuk pengaduan), biaya yang dibebankan dan waktu yang dibutuhkan melalui media <i>website</i> , dan lain-lainnya<br>c. Informasi dan status atas pelayanan Keimigrasian yang diberikan serta informasi wajib lainnya sesuai dengan ketentuan KIP | Desember 2012          | Peningkatan apresiasi masyarakat terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen Imigrasi | Kementerian Hukum dan HAM       | Sekjen Ombudsman RI |
| 30 |                              | Penguatan pengawasan internal dilingkungan Ditjen Imigrasi          | Tersedianya mekanisme (SOP) pengawasan internal di lingkungan Keimigrasian termasuk pelaksanaan evaluasi perilaku dan kinerja serta penyimpangan oknum petugas Keimigrasian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Desember 2012          | Berkurangnya pelanggaran/ penyimpangan perilaku aparat Imigrasi                        | Kementerian Hukum dan HAM       | Sekjen Ombudsman RI |

| No | Isu/<br>Strategi<br>Nasional | Aksi                                                         | Keluaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Target<br>Penyelesaian | Sasaran                                                                                                                                                                                                                                                                    | Instansi<br>Penanggung<br>Jawab | Instansi<br>Terkait             |
|----|------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|    | (1)                          | (2)                                                          | (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (4)                    | (5)                                                                                                                                                                                                                                                                        | (6)                             | (7)                             |
|    |                              |                                                              | Terpublikasinya hasil pengawasan internal di <i>website</i> Ditjen Imigrasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                 |
|    |                              |                                                              | Terlaksananya monitoring dan evaluasi mekanisme pengawasan internal di <i>website</i> Ditjen Imigrasi                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan perlindungan bagi <i>whistle blower</i> di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM</li> <li>2. Mendorong pengungkapan penyimpangan/penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan aparat Kementerian Hukum dan HAM</li> </ol> |                                 |                                 |
| 31 |                              | Penguatan pengawasan eksternal di lingkungan Ditjen Imigrasi | <p>Tersedianya mekanisme (SOP) pengawasan eksternal di lingkungan Keimigrasian termasuk pelaksanaan evaluasi perilaku dan kinerja serta penyimpangan oknum petugas Keimigrasian</p> <p>Terlaksananya monitoring dan evaluasi mekanisme pengawasan eksternal di <i>website</i> Ditjen Imigrasi</p> <p>Terpublikasinya hasil pengawasan eksternal dalam <i>website</i> Ditjen Imigrasi</p> | Desember 2012          | Berkurangnya pelanggaran/ penyimpangan perilaku aparat Imigrasi                                                                                                                                                                                                            | Kementerian Hukum dan HAM       | Sekjen Ombudsman RI, Satgas PMH |

| No | Isu/<br>Strategi<br>Nasional | Aksi                                                                             | Keluaran                                                                                      | Target<br>Penyelesaian | Sasaran                                                                                                                                                                                                            | Instansi<br>Penanggung<br>Jawab | Instansi<br>Terkait |
|----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|
|    | (1)                          | (2)                                                                              | (3)                                                                                           | (4)                    | (5)                                                                                                                                                                                                                | (6)                             | (7)                 |
| 32 |                              | Pelaksanaan sistem <i>whistle blower</i> di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM | Tersedianya mekanisme (SOP) perlindungan bagi petugas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM | Desember 2012          | 1. Peningkatan perlindungan bagi <i>whistle blower</i> di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM<br>2. Mendorong pengungkapan penyimpangan/penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan aparat Kementerian Hukum dan HAM | Kementerian Hukum dan HAM       |                     |
| 33 |                              | Penyelesaian atas pengaduan masyarakat terhadap tugas dan fungsi Keimigrasian    | Tertanganinya seluruh pengaduan masyarakat atas layanan keimigrasian                          | Desember 2012          | Peningkatan kualitas pelayanan publik dilingkungan keimigrasian                                                                                                                                                    | Kementerian Hukum dan HAM       | Sekjen Ombudsman RI |
|    |                              |                                                                                  | 100% pengaduan masyarakat ditindaklanjuti                                                     | Desember 2012          |                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                     |

| No | Isu/<br>Strategi<br>Nasional | Aksi                                                              | Keluaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Target<br>Penyelesaian | Sasaran                                                                                           | Instansi<br>Penanggung<br>Jawab | Instansi<br>Terkait |
|----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|
|    | (1)                          | (2)                                                               | (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (4)                    | (5)                                                                                               | (6)                             | (7)                 |
| 34 |                              | Pelaksanaan transparansi Layanan Publik di lingkungan Ditjen AHU  | Penguatan Sistem Administrasi Badan Hukum yang memberikan Keterbukaan Informasi administrasi badan hukum yang antara lain memuat:<br>a. Profil Organisasi dan SDM, struktur organisasi dan tugas/fungsi unit, nama pejabat dan kontak pejabat yang dapat dihubungi<br>b. Jenis layanan, mekanisme layanan AHU (pendaftaran badan usaha dan lainnya termasuk pengaduan), biaya yang dibebankan dan waktu yang dibutuhkan melalui media <i>website</i> , meja informasi dan lain-lainnya<br>c. Informasi dan status atas pelayanan AHU yang diberikan | Desember 2012          | Peningkatan pelayanan kepada <i>stakeholders</i> terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen AHU | Kementerian Hukum dan HAM       |                     |
| 35 |                              | Penyusunan mekanisme pengawasan internal di lingkungan Ditjen AHU | Tersedianya mekanisme (SOP) pengawasan internal di lingkungan Ditjen AHU termasuk pelaksanaan evaluasi kinerja pelayanan serta penyimpangan oknum petugas di lingkungan Ditjen AHU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Agustus 2012           | Berkurangnya pelanggaran/ penyimpangan perilaku petugas pelayanan AHU                             | Kementerian Hukum dan HAM       | Sekjen Ombudsman RI |

| No | Isu/<br>Strategi<br>Nasional | Aksi                                                       | Keluaran                                                                                       | Target<br>Penyelesaian | Sasaran                                                                                                                                                                                                                                                                  | Instansi<br>Penanggung<br>Jawab | Instansi<br>Terkait |
|----|------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|
|    | (1)                          | (2)                                                        | (3)                                                                                            | (4)                    | (5)                                                                                                                                                                                                                                                                      | (6)                             | (7)                 |
| 36 |                              | Pelaksanaan <i>whistle blower</i> di lingkungan Ditjen AHU | Tersedianya mekanisme (SOP) perlindungan terhadap <i>Whistle blower</i> bagi petugas pelayanan | Desember 2012          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan perlindungan bagi <i>whistle blower</i> di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM</li> <li>- Mendorong pengungkapan penyimpangan/penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan aparat Kementerian Hukum dan HAM</li> </ul> | Kementerian Hukum dan HAM       |                     |
| 37 |                              | Pelaksanaan pengaduan masyarakat di lingkungan Ditjen AHU  | Tersedianya sarana pengaduan masyarakat terhadap tugas dan fungsi Ditjen AHU                   | Desember 2012          | Peningkatan upaya pencegahan terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan petugas pelayanan dan pengawasan terhadap kinerja Ditjen AHU dalam rangka pelayanan kepada masyarakat                                                                                            | Kementerian Hukum dan HAM       | Sekjen Ombudsman RI |
|    |                              |                                                            | Tertanganinya seluruh pengaduan masyarakat yang telah diverifikasi                             |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                     |
|    |                              |                                                            | Terpublikasinya pelaksanaan pengaduan masyarakat melalui <i>website</i> AHU                    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                     |

| No | Isu/<br>Strategi<br>Nasional | Aksi                                                                | Keluaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Target<br>Penyelesaian                | Sasaran                                                                                                                                                                                           | Instansi<br>Penanggung<br>Jawab       | Instansi<br>Terkait    |
|----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|    | (1)                          | (2)                                                                 | (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (4)                                   | (5)                                                                                                                                                                                               | (6)                                   | (7)                    |
| 38 |                              | Pelaksanaan<br>transparansi Layanan<br>Publik di lingkungan<br>BPN. | <p>Terpublikasinya Informasi pelayanan publik pertanahan di lingkungan BPN yang antara lain memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Profil Organisasi dan SDM, struktur organisasi dan tugas/fungsi unit, nama pejabat dan kontak pejabat yang dapat dihubungi</li> <li>b. Jenis layanan pertanahan, mekanisme layanan pertanahan (antara lain mengenai pelayanan peralihan hak dan pembebanan hak), biaya yang dibebankan (termasuk pelayanan pembayaran sistem loket) dan waktu yang dibutuhkan melalui media <i>website</i>, meja informasi dan lain-lainnya</li> <li>c. Informasi dan status atas pelayanan pertanahan yang diberikan melalui <i>website</i></li> </ul> | <p>Juni 2012</p> <p>Desember 2012</p> | Peningkatan pelayanan kepada masyarakat atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPN dan penyelenggaraan pelayanan pertanahan yang cepat, non diskriminatif, transparan dan akuntabel serta bebas pungli | Badan<br>Pertanahan<br>Nasional (BPN) | Sekjen<br>Ombudsman RI |

| No | Isu/<br>Strategi<br>Nasional | Aksi                                                                               | Keluaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Target<br>Penyelesaian | Sasaran                                                                                                                                                                                      | Instansi<br>Penanggung<br>Jawab | Instansi<br>Terkait |
|----|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|
|    | (1)                          | (2)                                                                                | (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (4)                    | (5)                                                                                                                                                                                          | (6)                             | (7)                 |
| 39 |                              | Pelayanan peralihan hak dan pembebanan hak sesuai ketentuan yang berlaku           | <p>Jumlah Kantor Pertanahan di berbagai provinsi yang melaksanakan pelayanan tunggal kegiatan peralihan hak jual beli, inbreng, merger dan kegiatan pembebanan sesuai ketentuan yang berlaku (125 Kantor Pertanahan termasuk 50 Kantor Pertanahan yang lama)</p> <p>Terselesaikannya 85% jumlah total permohonan pelayanan peralihan dan pembebanan hak yang masuk sesuai waktu penyelesaiannya dan biaya yang ditetapkan</p> | Desember 2012          | Peningkatan kualitas pelayanan Publik di bidang pertanahan yang cepat, non diskriminatif, transparan dan akuntabel yang bebas dari korupsi                                                   | BPN                             | Sekjen Ombudsman RI |
| 40 |                              | Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Masyarakat dilingkungan Kantor Pertanahan dan BPN | Tersedianya sarana pengaduan masyarakat dan proses pengelolaan pengaduan masyarakat secara responsif melalui portal BPN di 50 Kantor Pertanahan ( <i>pilot project</i> )                                                                                                                                                                                                                                                      | Juni 2012              | Peningkatan upaya pencegahan terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan petugas pelayanan dan pengawasan terhadap kinerja Kantor Pertanahan dan BPN dalam rangka pelayanan kepada masyarakat | BPN                             | Sekjen Ombudsman RI |



| No | Isu/<br>Strategi<br>Nasional | Aksi                                                                             | Keluaran                                                                                                                                                                                                                                                    | Target<br>Penyelesaian         | Sasaran                                                                                                                                                                                                            | Instansi<br>Penanggung<br>Jawab | Instansi<br>Terkait |
|----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|
|    | (1)                          | (2)                                                                              | (3)                                                                                                                                                                                                                                                         | (4)                            | (5)                                                                                                                                                                                                                | (6)                             | (7)                 |
| 41 |                              | Penerapan Pelayanan pertanahan berbasis sistem loket                             | Terlaksananya pelayanan pertanahan kepada masyarakat di 75 kantor Pertanahan dengan sistem loket termasuk Kantor Pertanahan yang terindikasi terjadi banyak penyimpangan berdasarkan Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2010 tentang Locket Layanan           | September 2012                 | Peningkatan upaya pencegahan terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan petugas kantor pertanahan dan BPN<br><br>Pengawasan kinerja Kantor Pertanahan dan BPN dalam rangka pelayanan kepada masyarakat             | BPN                             | Sekjen Ombudsman RI |
| 42 |                              | Pelaksanaan <i>whistle blower system</i> di lingkungan kantor Pertanahan dan BPN | Tersusunnya mekanisme (SOP) perlindungan bagi aparat/petugas di Kantor Pertanahan dan BPN.<br><br>Tertanganinya seluruh pengaduan aparat/petugas di kantor Pertanahan dan BPN ( <i>whistle blower</i> ) terkait pelanggaran disiplin atau pelanggaran hukum | Juni 2012<br><br>Desember 2012 | 1. Peningkatan perlindungan bagi <i>whistle blower</i> di lingkungan Kantor Pertanahan dan BPN<br>2. Mendorong pengungkapan penyimpangan/penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan aparat Kantor Pertanahan dan BPN | BPN                             |                     |
| 43 |                              | Penguatan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan NIK dan e-KTP                     | Terlaksananya pengawasan atas penerbitan NIK di 497 Kab/Kota dan e-KTP di 300 Kab/Kota (100,51 juta jiwa)                                                                                                                                                   | Desember 2012                  | Meminimalisir terjadinya penyimpangan atas penerbitan NIK dan e-KTP yang berpotensi korupsi                                                                                                                        | Kementerian Dalam Negeri        |                     |

| No | Isu/<br>Strategi<br>Nasional | Aksi                                                                                                              | Keluaran                                                                                                                                                                                                               | Target<br>Penyelesaian | Sasaran                                                                                      | Instansi<br>Penanggung<br>Jawab | Instansi<br>Terkait |
|----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|
|    | (1)                          | (2)                                                                                                               | (3)                                                                                                                                                                                                                    | (4)                    | (5)                                                                                          | (6)                             | (7)                 |
| 44 |                              | Pengawasan terhadap optimalisasi pelaksanaan koneksitas data kependudukan dari penyelenggara ke instansi pengguna | Tersedianya database kependudukan nasional berbasis NIK yang dapat di akses oleh K/L terkait                                                                                                                           | September 2012         | Peningkatan pemanfaatan data kependudukan berbasis NIK nasional oleh K/L                     | Kementerian Dalam Negeri        |                     |
|    |                              |                                                                                                                   | Jumlah K/L yang dapat mengakses dan memanfaatkan database kependudukan sebagai dasar penerbitan dokumen, informasi untuk pelayanan publik terkait ( <i>Pilot Project</i> dengan 5 K/L)                                 | Desember 2012          |                                                                                              |                                 |                     |
| 45 |                              | Pelaksanaan transparansi pengelolaan anggaran Daerah                                                              | Jumlah Provinsi, Kab/Kota yang mempublikasikan data mutakhir APBD, RAPBD, RKA SKPD, APBD, DPA SKPD, LKPD, laporan realisasi anggaran melalui <i>website</i> nasional Kemendagri dan <i>website</i> masing-masing Pemda | Juni 2012              | Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran pemerintah daerah            | Kementerian Dalam Negeri        |                     |
| 46 |                              | Pelaksanaan transparansi dalam pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam                                  | Publikasi informasi penerimaan dan belanja negara terkait pengelolaan sumber daya alam di bidang minyak, gas, dan pertambangan secara rutin dalam <i>website</i>                                                       | Desember 2012          | Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam | Kementerian BUMN                |                     |

| No | Isu/<br>Strategi<br>Nasional | Aksi                                                                                        | Keluaran                                                                                                                                                          | Target<br>Penyelesaian | Sasaran                                                                                                                   | Instansi<br>Penanggung<br>Jawab             | Instansi<br>Terkait |
|----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|
|    | (1)                          | (2)                                                                                         | (3)                                                                                                                                                               | (4)                    | (5)                                                                                                                       | (6)                                         | (7)                 |
|    |                              |                                                                                             | Publikasi pelaporan pendapatan daerah dari industri ekstraktif (minyak, gas, dan tambang) secara rutin dalam <i>website</i> Pemerintah Daerah                     |                        |                                                                                                                           | Kementerian Dalam Negeri                    | Pemerintah Daerah   |
|    |                              |                                                                                             | Persentase data <i>cost recovery</i> yang di publikasikan dalam <i>website</i>                                                                                    |                        |                                                                                                                           | Kementerian BUMN                            | Kemenkeu, BI        |
|    |                              |                                                                                             | Publikasi rehabilitasi pasca tambang dalam <i>website</i>                                                                                                         |                        |                                                                                                                           | Kementerian ESDM                            |                     |
|    |                              |                                                                                             | Publikasi laporan penerimaan negara dari industri ekstraktif (minyak, gas dan tambang) melalui <i>website</i>                                                     |                        | Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan industri ekstraktif (minyak, gas dan tambang)                      | Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian |                     |
| 47 |                              | Pelaksanaan transparansi Layanan Publik di lingkungan Bea dan Cukai                         | Terlaksananya pelayanan cukai yang cepat, akurat, efektif dan efisien melalui sistem pelayanan cukai <i>online</i> berbasis web yang terintegrasi secara nasional | Desember 2012          | Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik di lingkungan Bea dan Cukai                                   | Kementerian Keuangan                        |                     |
| 48 |                              | Pelaksanaan kerjasama antara Kementerian Keuangan dengan PPATK dalam rangka pertukaran data | Terlaksananya pertukaran data berdasarkan <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU) antara Kementerian Keuangan (Ditjen Pajak) dengan PPATK                        | Desember 2012          | Peningkatan kualitas <i>Governance</i> Dirjen Pajak di bidang pemeriksaan berbasis analisis risiko dengan data yang andal | Kementerian Keuangan                        |                     |

| No | Isu/<br>Strategi<br>Nasional | Aksi                                                                                                               | Keluaran                                                                                                                                                                                                                                              | Target<br>Penyelesaian | Sasaran                                                                                              | Instansi<br>Penanggung<br>Jawab | Instansi<br>Terkait                                                          |
|----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|    | (1)                          | (2)                                                                                                                | (3)                                                                                                                                                                                                                                                   | (4)                    | (5)                                                                                                  | (6)                             | (7)                                                                          |
| 49 |                              | Pelaksanaan <i>whistle blower system</i> di lingkungan Dirjen Pajak                                                | Terselesaikannya 60% kasus pengaduan yang masuk, secara transparan dan konsisten                                                                                                                                                                      | Desember 2012          | Peningkatan perlindungan bagi <i>whistle blower</i> di lingkungan Dirjen Pajak                       | Kementerian Keuangan            |                                                                              |
|    |                              |                                                                                                                    | Terselesaikannya infrastruktur dan sistem informasi pendukung pelaksanaan <i>whistle blower system</i> di DJP berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak No PER-22/PJ.11/2011                                                                                 | Desember 2012          | Mendorong pengungkapan penyimpangan/ penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan aparat Dirjen Pajak    |                                 |                                                                              |
| 50 |                              | Penerapan Pakta Integritas secara konsisten pada K/L, Pemerintah Daerah dan pengawasannya oleh komponen masyarakat | Terlaksananya penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh K/L serta Pemda Prov/Kab/Kota (Bebas Korupsi) dengan BPK, BPKP, KPK (untuk K/L), Kejaksaan dan POLRI (untuk Pemda Prov/Kab/ Kota) serta CSO setempat yang bergerak di Bidang Anti Korupsi | Maret 2012             | Peningkatan Integritas K/L dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya masing-masing | Kementerian PAN dan RB          | BPK, BPKP, Sekjen KPK, Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara Republik Indonesia |
|    |                              |                                                                                                                    | Laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas integritas K/L maupun Pemda terkait                                                                                                                                                                  | Desember 2012          |                                                                                                      |                                 |                                                                              |
| 51 |                              | Pembangunan sistem Pengendalian dan pengawasan proses pelayanan publik                                             | Tersedianya sistem pengendalian dan pengawasan pelayanan publik berbasis TI                                                                                                                                                                           | Agustus 2012           | 1. Peningkatan kegiatan pengawasan pelayanan publik dan pencegahan maladministrasi                   | Sekjen Ombudsman RI             |                                                                              |

berbasis ...

| No | Isu/<br>Strategi<br>Nasional | Aksi                                                                                           | Keluaran                                                                                                                              | Target<br>Penyelesaian | Sasaran                                                                                                                               | Instansi<br>Penanggung<br>Jawab       | Instansi<br>Terkait |
|----|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|
|    | (1)                          | (2)                                                                                            | (3)                                                                                                                                   | (4)                    | (5)                                                                                                                                   | (6)                                   | (7)                 |
|    |                              | berbasis Teknologi Informasi (TI)                                                              | Terselesaikannya laporan pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik                                                                |                        | 2. Peningkatan penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dengan pelayanan publik                                              |                                       |                     |
| 52 |                              | Penguatan Pengawasan atas penyaluran serta penggunaan dana BOS yang dikelola Kemendikbud       | Tersedia dan terlaksananya revisi sistem pengawasan atas penyaluran dan penggunaan dana BOS secara <i>online</i>                      | Desember 2012          | Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyaluran dan penggunaan dana BOS                                                         | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan |                     |
| 53 |                              | Penguatan pengawasan atas penyaluran serta penggunaan dana BOS yang dikelola Kementerian Agama | Tersedia dan terlaksananya revisi sistem pengawasan atas penyaluran dan penggunaan dana BOS secara <i>online</i>                      | Desember 2012          | Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyaluran dan penggunaan dana BOS                                                         | Kementerian Agama                     |                     |
| 54 |                              | Pengawasan atas penyaluran dan penggunaan dana BOK, Jamkesmas dan Jampersal yang bebas korupsi | Tersedianya dan terlaksananya sistem pengawasan atas penyaluran dan penggunaan dana BOK, Jamkesmas dan Jampersal secara <i>online</i> | Desember 2012          | Sistem pengawasan atas penyaluran dan penggunaan dana BOK, Jamkesmas dan Jampersal yang transparan dan akuntabel secara <i>online</i> | Kementerian Kesehatan                 | BPKP                |

| No | Isu/<br>Strategi<br>Nasional | Aksi                                                                              | Keluaran                                                                                                               | Target<br>Penyelesaian | Sasaran                                                                                                                | Instansi<br>Penanggung<br>Jawab | Instansi<br>Terkait                                                               |
|----|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|    | (1)                          | (2)                                                                               | (3)                                                                                                                    | (4)                    | (5)                                                                                                                    | (6)                             | (7)                                                                               |
| 55 |                              | Pengawasan atas pelaksanaan proses registrasi alat kesehatan secara <i>online</i> | Tersedianya dan terlaksananya sistem pengawasan atas pelaksanaan proses registrasi alat kesehatan secara <i>online</i> | Desember 2012          | Sistem pengawasan atas pelaksanaan proses registrasi alat kesehatan yang transparan dan akuntabel secara <i>online</i> | Kementerian Kesehatan           | Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Bapeten |
| 56 |                              | Peningkatan transparansi dan akuntabilitas di bidang pertambangan dan migas       | Terlaksananya proses penentuan kebijakan di bidang pertambangan melalui pemanfaatan TI                                 | Desember 2012          | Tersedianya sistem informasi pengelolaan di bidang pertambangan mineral dan batubara secara transparan                 | Kementerian ESDM                | Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, Pemerintah Daerah                     |
|    |                              |                                                                                   | Peninjauan pemberian izin pertambangan oleh Pemda                                                                      | Desember 2012          | Terselesaikannya inventarisasi izin pertambangan yang diberikan oleh Pemda                                             | Kementerian ESDM                | Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Pemerintah Daerah            |

| No | Isu/<br>Strategi<br>Nasional | Aksi | Keluaran                                                                                                                                               | Target<br>Penyelesaian | Sasaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Instansi<br>Penanggung<br>Jawab | Instansi<br>Terkait                                       |
|----|------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|    | (1)                          | (2)  | (3)                                                                                                                                                    | (4)                    | (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (6)                             | (7)                                                       |
|    |                              |      | Peningkatan monitoring operasional pertambangan                                                                                                        | Desember 2012          | Termonitornya kegiatan operasional pertambangan yang dapat dipertanggungjawabkan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kementerian ESDM                | Pemerintah Daerah                                         |
|    |                              |      | Laporan penyusunan penetapan daerah penghasil dan alokasi dasar penghitungan <i>lifting</i> migas serta realisasi <i>lifting</i> migas setiap triwulan | Desember 2012          | Penetapan perkiraan <i>lifting</i> migas per daerah penghasil dapat lebih cepat, tepat dan akurat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kementerian ESDM                | Kementerian Dalam Negeri, Bakosurtanal, Pemerintah Daerah |
|    |                              |      | Laporan implementasi, pemeliharaan dan pengembangan sistem monitoring <i>lifting</i> migas                                                             | Desember 2012          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diperolehnya data volume produksi dan <i>lifting</i> secara <i>online</i> dan kontinyu</li> <li>2. Membangun akses informasi volume produksi dan <i>lifting</i> migas bagi seluruh <i>stakeholder</i> secara cepat dan transparan</li> <li>3. Tersedianya bahan evaluasi bagi pimpinan dalam rangka membuat kebijakan terkait dengan kegiatan produksi dan <i>lifting</i> migas</li> </ol> | Kementerian ESDM                | Kementerian Dalam Negeri, BP MIGAS                        |

| No | Isu/<br>Strategi<br>Nasional | Aksi | Keluaran                                                                                | Target<br>Penyelesaian | Sasaran                                                                                                                                                                                                                                                        | Instansi<br>Penanggung<br>Jawab | Instansi<br>Terkait |
|----|------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|
|    | (1)                          | (2)  | (3)                                                                                     | (4)                    | (5)                                                                                                                                                                                                                                                            | (6)                             | (7)                 |
|    |                              |      | Laporan penyiapan dan implementasi e-proc Ditjen Migas - KESDM                          | Desember 2012          | Meningkatkan pelayanan, transparansi dan akuntabilitas di bidang pengadaan barang dan jasa di lingkungan Ditjen Migas – KESDM                                                                                                                                  | Kementerian ESDM                | LKPP                |
|    |                              |      | Laporan pengelolaan dan pengembangan data dan sistem informasi teknologi serta jaringan | Desember 2012          | 1. Terbentuknya sistem pelayanan yang bersih, transparan dan efisien<br>2. Memberikan layanan investasi terpadu secara <i>online</i> di Ditjen Migas<br>3. Perbaikan organisasi data, sistem informasi dan proses kerja pelayanan<br>4. investasi Ditjen Migas | Kementerian ESDM                |                     |
|    |                              |      | Termonitornya efek lingkungan hidup dalam kegiatan operasional pertambangan             | September 2012         | Peningkatan kualitas lingkungan hidup dalam kegiatan operasional pertambangan                                                                                                                                                                                  | Kementerian Lingkungan Hidup    |                     |



| No                               | Isu/<br>Strategi<br>Nasional | Aksi                                                                               | Keluaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Target<br>Penyelesaian | Sasaran                                                                               | Instansi<br>Penanggung<br>Jawab | Instansi<br>Terkait |
|----------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|
|                                  | (1)                          | (2)                                                                                | (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (4)                    | (5)                                                                                   | (6)                             | (7)                 |
| 57                               |                              | Memperkuat koordinasi dan supervisi bidang pencegahan baik di K/L maupun di daerah | Penguatan pelaksanaan koordinasi dan supervisi KPK bidang Pencegahan dengan sasaran sistem PBJ, sistem penganggaran dan pelayanan publik di semua Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia melalui :<br>1. Supervisi, pembenahan sistem layanan publik di Pemprov/Pemkot dan Pemkab<br>2. Koordinasi dengan Pemprov, Pemkot dan Pemkab pada sistem PBJ dan sistem penganggaran/keuangan<br>3. Tahun 2012 akan dilaksanakan di 33 Provinsi masing-masing 3 lokasi di Provinsi, Kota dan Kabupaten | Desember 2012          | Optimalisasi fungsi koordinasi dan supervisi bidang Pencegahan                        | Sekjen KPK                      |                     |
| Implementasi UU Pelayanan Publik |                              |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                                                                                       |                                 |                     |
| 58                               |                              | Penerapan Undang-undang Pelayanan Publik                                           | Terbitnya PermenPAN dan RB tentang Juknis Standar Pelayanan Publik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | April 2012             | Peningkatan kualitas pelayanan publik berdasarkan standar yang sama di K/L dan Daerah | Kementerian PAN dan RB          | Sekjen Ombudsman RI |
|                                  |                              |                                                                                    | Terdiseminasikannya UU Pelayanan Publik dan peraturan pelaksanaannya ke seluruh K/L dan Pemda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Juni 2012              |                                                                                       |                                 |                     |

| No | Isu/<br>Strategi<br>Nasional | Aksi                                                                              | Keluaran                                                                                                                                                                              | Target<br>Penyelesaian | Sasaran                                                                                                                                                                                      | Instansi<br>Penanggung<br>Jawab                  | Instansi<br>Terkait                    |
|----|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|
|    | (1)                          | (2)                                                                               | (3)                                                                                                                                                                                   | (4)                    | (5)                                                                                                                                                                                          | (6)                                              | (7)                                    |
| 59 |                              | Pemantauan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di daerah                  | Terfasilitasinya pelaksanaan pelayanan publik di daerah berdasarkan indikator utama (fasilitasi untuk penyusunan 15 SPM)                                                              | Juni 2012              | Peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah sesuai SPM                                                                                                                                   | Kementerian Dalam Negeri                         | Pemerintah Daerah, Sekjen Ombudsman RI |
| 60 |                              | Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik                          | Tersedianya instrumen pemantauan dan evaluasi/penilaian penyelenggaraan pelayanan publik                                                                                              | Juni 2012              | Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai standar pelayanan publik                                                                                                                        | Kementerian PAN dan RB                           | Sekjen Ombudsman RI                    |
|    |                              |                                                                                   | Terpublikasinya hasil evaluasi/penilaian terhadap pelaksanaan pelayanan publik pada penyelenggara terpilih yang sangat strategis                                                      | Desember 2012          |                                                                                                                                                                                              |                                                  |                                        |
| 61 |                              | Penyempurnaan mekanisme perizinan di bidang lingkungan hidup                      | Terbitnya RPP baru/revisi dan peraturan dibawahnya tentang perizinan dibidang lingkungan hidup yang berazas cepat, non diskriminatif, transparan, akuntabel dan harga yang terjangkau | Juni 2012              | Peningkatan kemudahan bagi masyarakat dan pelaku dunia usaha dalam pengurusan perizinan di bidang lingkungan hidup tanpa dibebani biaya ekstra/pungutan liar                                 | Kementerian Lingkungan Hidup                     |                                        |
| 62 |                              | Penyempurnaan sistem pengendalian intern yang menekankan pada <i>soft control</i> | Terbitnya 60 laporan hasil perbaikan sistem pengendalian intern yang berbasis risiko                                                                                                  | Desember 2012          | 1. Peningkatan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, pengamanan aset yang tinggi<br>2. Peningkatan kehandalan laporan keuangan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah | Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) | Seluruh K/L, Pemerintah Daerah         |

| No                                            | Isu/<br>Strategi<br>Nasional | Aksi                                                                                       | Keluaran                                                                                                 | Target<br>Penyelesaian | Sasaran                                                                                                                                                                                                                                                       | Instansi<br>Penanggung<br>Jawab | Instansi<br>Terkait                                 |
|-----------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                               | (1)                          | (2)                                                                                        | (3)                                                                                                      | (4)                    | (5)                                                                                                                                                                                                                                                           | (6)                             | (7)                                                 |
|                                               |                              |                                                                                            |                                                                                                          |                        | 3. Berkurangnya perilaku korupsi dalam organisasi pemerintah                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                                     |
| 63                                            |                              | Penyusunan peraturan sistem pengendalian intern di Kementerian/ Lembaga dan Pemda          | Terbitnya 90 Peraturan Menteri, Kepala Lembaga, Gubernur, Bupati dan Walikota                            | Desember 2012          | 1. Peningkatan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, pengamanan asset yang tinggi<br>2. Peningkatan kehandalan laporan keuangan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah<br>3. Berkurangnya perilaku korupsi dalam organisasi pemerintah | BPKP                            | Seluruh K/L, Pemerintah Daerah, Sekjen Ombudsman RI |
| Pembenahan Sistem Melalui Reformasi Birokrasi |                              |                                                                                            |                                                                                                          |                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                                     |
| 64                                            |                              | Penyusunan peraturan pelaksanaan UU No. 17/2003 mengenai anggaran berbasis kinerja         | Tersusunnya Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan RKA-KL | Desember 2012          | Peningkatan kualitas pengelolaan administrasi keuangan negara yang transparan dan akuntabel                                                                                                                                                                   | Kementerian Keuangan            | Kementerian Hukum dan HAM                           |
| 65                                            |                              | Penyusunan peraturan mengenai sistem rekrutmen pegawai di seluruh K/L secara <i>online</i> | Terbitnya peraturan tentang sistem rekrutmen pegawai di seluruh K/L secara <i>online</i>                 | Juni 2012              | Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses rekrutmen pegawai di seluruh K/L.                                                                                                                                                                     | Kementerian PAN dan RB          | Seluruh K/L                                         |

| No | Isu/<br>Strategi<br>Nasional | Aksi                                                                                                               | Keluaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Target<br>Penyelesaian | Sasaran                                                                                                                     | Instansi<br>Penanggung<br>Jawab | Instansi<br>Terkait                                                                   |
|----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | (1)                          | (2)                                                                                                                | (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (4)                    | (5)                                                                                                                         | (6)                             | (7)                                                                                   |
| 66 |                              | Perubahan PP Disiplin PNS (PP 53/2010) yang mengatur penjatuhan sanksi bagi PNS yang memiliki kekayaan tidak wajar | 1. Terbitnya revisi PP 53 tahun 2010 (pasal 6) tentang Disiplin PNS. Oleh karena proses pembuktian terbalik merupakan proses yustisia maka revisi PP tersebut antara lain mengatur : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Apabila seorang PNS yang sedang dalam proses penyelidikan, atau penyidikan, atau dalam proses peradilan yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dapat dilakukan pemeriksaan oleh atasan yang berwenang terhadap harta kekayaannya yang dinilai tidak wajar</li> <li>- Dalam hal atasan memperoleh bukti-bukti yang cukup dan meyakinkan bahwa harta kekayaan PNS dimaksud diperoleh dengan tidak wajar, maka atasan yang berwenang dapat menjatuhkan hukuman disiplin, namun mengingat rasa keadilan maka penjatuhan hukuman disiplin dilakukan setelah ada putusan</li> </ul> | September 2012         | Peningkatan akuntabilitas PNS serta pengawasan dari pihak internal dan eksternal terkait dengan perolehan harta kekayaannya | Kementerian PAN dan RB          | Kementerian Hukum dan HAM, Setneg, Kementerian Dalam Negeri, BKN, Sekjen Ombudsman RI |

| No | Isu/<br>Strategi<br>Nasional | Aksi                                                    | Keluaran                                                                                                                                                                                                                                                                        | Target<br>Penyelesaian | Sasaran                                                                                          | Instansi<br>Penanggung<br>Jawab | Instansi<br>Terkait                                                                                             |
|----|------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | (1)                          | (2)                                                     | (3)                                                                                                                                                                                                                                                                             | (4)                    | (5)                                                                                              | (6)                             | (7)                                                                                                             |
|    |                              |                                                         | <p>peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap mengenai hukum pidana korupsinya.</p> <p>2. Pengaturan mekanisme pelaksanaan sanksi</p> <p>3. Pemberian kewenangan kepada Instansi pengawas internal dan eksternal untuk melakukan pemeriksaan atas pelanggaran</p> |                        |                                                                                                  |                                 |                                                                                                                 |
| 67 |                              | Pengawasan seleksi dan promosi di lembaga penegak hukum | Tersedianya mekanisme pengawasan seleksi dan promosi bagi aparat penegak hukum                                                                                                                                                                                                  | Mei 2012               | Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses seleksi dan promosi aparat penegak hukum | Kementerian PAN dan RB          | Kejaksaan Agung,<br>Kepolisian Negara Republik Indonesia,<br>Kementerian Hukum dan HAM,<br>Kementerian Keuangan |
|    |                              |                                                         | Tersedianya laporan mengenai pengawasan seleksi dan promosi bagi aparat penegak hukum                                                                                                                                                                                           | Desember 2012          |                                                                                                  |                                 |                                                                                                                 |
|    |                              |                                                         | Tersedianya hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan seleksi dan promosi bagi aparat penegak hukum                                                                                                                                                                        |                        |                                                                                                  |                                 |                                                                                                                 |

| No | Isu/<br>Strategi<br>Nasional | Aksi                                                                                                      | Keluaran                                                                                                                                                                                        | Target<br>Penyelesaian | Sasaran                                                                                                | Instansi<br>Penanggung<br>Jawab | Instansi<br>Terkait                                                                                           |
|----|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | (1)                          | (2)                                                                                                       | (3)                                                                                                                                                                                             | (4)                    | (5)                                                                                                    | (6)                             | (7)                                                                                                           |
| 68 |                              | Penyusunan peraturan pelaksanaan rotasi dan promosi PNS secara terbuka, akuntabel dan berbasis kompetensi | Terbitnya Peraturan Pemerintah mengenai keterbukaan informasi dalam pelaksanaan rotasi dan promosi PNS<br><br>Terpublikasinya hasil evaluasi terhadap pelaksanaan sistem rotasi dan promosi PNS | Juni 2012              | Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen kepegawaian termasuk rotasi dan promosi PNS | Kementerian PAN dan RB          | Kementerian Hukum dan HAM, Setneg, Kementerian Dalam Negeri, BKN                                              |
| 69 |                              | Pengangkatan dalam jabatan dan rotasi berbasis kompetensi                                                 | Terbitnya Peraturan Menteri PAN dan RB tentang standarisasi kompetensi jabatan                                                                                                                  | Juni 2012              | Peningkatan kinerja PNS                                                                                | Kementerian PAN dan RB          | Kementerian Hukum dan HAM, Setneg, Kementerian Dalam Negeri, BKN, BPKP, LAN, dan pengawasan Internal Instansi |
| 70 |                              | Penyusunan pengaturan mengenai anti benturan kepentingan ( <i>conflict of interest</i> )                  | Terbitnya Peraturan Menteri PAN dan RB mengenai Konflik Kepentingan bagi pejabat di lingkungan birokrasi                                                                                        | Juni 2012              | Berkurangnya praktek penyalahgunaan kewenangan pejabat dalam proses penyusunan kebijakan               | Kementerian PAN dan RB          | BKN, LAN                                                                                                      |

| No | Isu/<br>Strategi<br>Nasional | Aksi                                                                                                                                                            | Keluaran                                                                                                                                                          | Target<br>Penyelesaian | Sasaran                                                                                                                                                                            | Instansi<br>Penanggung<br>Jawab | Instansi<br>Terkait     |
|----|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
|    | (1)                          | (2)                                                                                                                                                             | (3)                                                                                                                                                               | (4)                    | (5)                                                                                                                                                                                | (6)                             | (7)                     |
| 71 |                              | Penguatan lembaga peradilan berdasarkan <i>competency based</i>                                                                                                 | Terlaksananya seleksi calon hakim berdasarkan kompetensi                                                                                                          | Desember 2012          | Peningkatan jumlah Hakim yang memiliki kompetensi dan integritas yang dibutuhkan dalam penegakan hukum                                                                             | Sekretariat MA                  |                         |
|    |                              |                                                                                                                                                                 | Terlaksananya diklat dan sertifikasi berdasarkan hasil seleksi kompetensi hakim                                                                                   |                        |                                                                                                                                                                                    |                                 |                         |
| 72 |                              | Pengawasan dan pelaksanaan kewajiban terkait LHKPN (UU RI Nomor 28 Tahun 1999) oleh pejabat minimal eselon II dan/atau pos-pos strategis yang ditentukan di K/L | Persentase LHKPN yang terkini dari pejabat minimal eselon II dan/atau pos-pos strategis yang menempati jabatan baru atau selesai menjabat                         | Desember 2012          | Peningkatan transparansi dan akuntabilitas kekayaan pejabat minimal eselon II dan/atau pos-pos strategis yang baru menduduki jabatan, menempati jabatan baru atau selesai menjabat | Kementerian PAN dan RB          | Sekjen KPK, Seluruh K/L |
|    |                              |                                                                                                                                                                 | Pelaksanaan dan Pemantauan penjatuhan sanksi administratif oleh K/L bagi pejabat minimal eselon II dan/atau pos-pos strategis yang tidak melaporkan LHKPN terkini |                        |                                                                                                                                                                                    |                                 |                         |

| No | Isu/<br>Strategi<br>Nasional | Aksi                                                                              | Keluaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Target<br>Penyelesaian | Sasaran                                                                                                                                                              | Instansi<br>Penanggung<br>Jawab                                                  | Instansi<br>Terkait                                                                       |
|----|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | (1)                          | (2)                                                                               | (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (4)                    | (5)                                                                                                                                                                  | (6)                                                                              | (7)                                                                                       |
| 73 |                              | Perbaiki sistem pengelolaan dan pengalokasian anggaran pada lembaga penegak hukum | <p>Tersedianya hasil audit sistem pengelolaan anggaran yang dilakukan di lembaga penegak hukum yang antara lain memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Praktek pengelolaan anggaran</li> <li>• Efisiensi dan ketepatan pengelolaan dan pengalokasian anggaran</li> <li>• Pertanggungjawaban penggunaan anggaran</li> <li>• Analisis kebutuhan riil anggaran</li> <li>• Rencana untuk pemenuhan kebutuhan anggaran (termasuk rencana untuk memanfaatkan berbagai ketentuan hukum yang memungkinkan peningkatan sumbangan PNBPN bagi Negara oleh lembaga penegak hukum)</li> </ul> | September 2012         | Pengelolaan dan pengalokasian anggaran lembaga penegak hukum yang sesuai dengan kebutuhan riil untuk mendukung efektifitas pelaksanaan kinerja lembaga penegak hukum | Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan HAM | BPKP, BPK, Komisi Kepolisian Nasional, Komisi Kejaksaan, Kementerian Keuangan, Sekjen KPK |
| 74 |                              | Pelaksanaan tindak lanjut hasil survei kinerja fungsi penanganan perkara          | Laporan hasil survei kinerja fungsi penanganan perkara yang dilakukan oleh Kepolisian dan Kejaksaan Agung secara bersama dengan pengawas eksternal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Agustus 2012           | Peningkatan kualitas Kinerja kepolisian dan Kejaksaan Agung terkait fungsi penanganan perkara                                                                        | Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara Republik Indonesia                            | Komisi Kepolisian Nasional, Komisi Kejaksaan, Sekjen Ombudsman RI                         |
|    |                              |                                                                                   | Laporan tindak lanjut hasil survey kinerja fungsi penanganan perkara dan rekomendasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Desember 2012          |                                                                                                                                                                      |                                                                                  |                                                                                           |



| No | Isu/<br>Strategi<br>Nasional | Aksi                                                                                         | Keluaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Target<br>Penyelesaian | Sasaran                                                                                                                                  | Instansi<br>Penanggung<br>Jawab                                                  | Instansi<br>Terkait                                                                  |
|----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|    | (1)                          | (2)                                                                                          | (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (4)                    | (5)                                                                                                                                      | (6)                                                                              | (7)                                                                                  |
| 75 |                              | Penempatan pejabat strategis lembaga penegak hukum                                           | Terdokumentasinya hasil assessment pejabat-pejabat pada posisi strategis, yang bisa diakses secara terbatas, dengan parameter-parameter, termasuk antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>- verifikasi terhadap harta kekayaan LHKPN dan transaksi keuangan (dengan meminta input dari KPK dan PPATK)</li> <li>- verifikasi terhadap kinerja dan integritas calon (dengan meminta input bawahan dan pengawasan internal)</li> <li>- evaluasi kinerja dalam penanganan perkara besar dan perkara yang menarik perhatian publik dalam posisi sebelumnya</li> </ul> | Desember 2012          | Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penempatan pejabat di pos-pos strategis yang dilakukan melalui proses assessment | Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan HAM | Komisi Kepolisian Nasional, Komisi Kejaksaan, Sekjen KPK, PPATK, Sekjen Ombudsman RI |
| 76 |                              | Penerapan rekrutmen penyidik melalui <i>assesment</i> (khusus)                               | Jumlah penyidik yang direkrut melalui <i>assessment</i> (khusus)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Desember 2012          | Peningkatan jumlah penyidik yang memiliki kompetensi khusus dan berintegritas berdasarkan proses yang adil dan akuntabel                 | Kepolisian Negara Republik Indonesia                                             | Kementerian PAN dan RB, Komisi Kepolisian Nasional                                   |
| 77 |                              | Pelaksanaan rekrutmen pegawai dan calon Jaksa dilaksanakan oleh pihak ketiga yang independen | Laporan pelaksanaan rekrutmen pegawai dan calon Jaksa oleh pihak ketiga yang independen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Desember 2012          | Peningkatan jumlah pegawai dan jaksa yang memiliki kompetensi dan berintegritas berdasarkan proses yang adil dan akuntabel               | Kejaksaan Agung                                                                  | Kementerian PAN dan RB, Komisi Kejaksaan                                             |

| No | Isu/<br>Strategi<br>Nasional | Aksi                                                                                                                                                                                       | Keluaran                                                                                                                                                                                                            | Target<br>Penyelesaian | Sasaran                                                                                                                                                                                                                                                                       | Instansi<br>Penanggung<br>Jawab      | Instansi<br>Terkait                                                                                                    |
|----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | (1)                          | (2)                                                                                                                                                                                        | (3)                                                                                                                                                                                                                 | (4)                    | (5)                                                                                                                                                                                                                                                                           | (6)                                  | (7)                                                                                                                    |
| 78 |                              | Pemberdayaan pengawasan eksternal dalam kerangka EMI (pengawasan Eksternal Memanfaatkan pengawasan Internal) dan IME (pengawasan Internal Mendukung pengawasan Eksternal) dalam Kepolisian | Tindak lanjut pengaduan/rekomendasi/klarifikasi/perbaikan dari Kompolnas, BPK, ORI, BPKP, KPK, Komnas HAM, KPIA, Komnas Perempuan, DPR, dan Organisasi Masyarakat Sipil oleh Kepolisian                             | Desember 2012          | Peningkatan akuntabilitas dan integritas kepolisian melalui pengawasan internal dan eksternal                                                                                                                                                                                 | Kepolisian Negara Republik Indonesia | Komisi Kepolisian Nasional, BPK, Sekjen Ombudsman RI, BPKP, Sekjen KPK, Komnas HAM, KPIA, Sekjen DPR, Komnas Perempuan |
| 79 |                              | Pelaksanaan penegakan hukum terkait pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat dan petugas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM                                                            | Laporan pelaksanaan kode etik dan pelanggaran disiplin<br>Terpublikasinya kepada masyarakat atas pelaksanaan pengenaan sanksi hukum maupun administrasi kepada pejabat dan petugas yang telah melakukan pelanggaran | Desember 2012          | <ul style="list-style-type: none"><li>- Menurunnya tingkat pelanggaran disiplin dan kode etik serta meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap upaya penegakan hukum</li><li>- Menurunnya jumlah pejabat dan petugas bermasalah yang dipromosikan dan dimutasikan</li></ul> | Kementerian Hukum dan HAM            | Sekjen Ombudsman RI                                                                                                    |

| No | Isu/<br>Strategi<br>Nasional | Aksi                                                                                               | Keluaran                                                                                                                           | Target<br>Penyelesaian | Sasaran                                                                                                                             | Instansi<br>Penanggung<br>Jawab | Instansi<br>Terkait            |
|----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
|    | (1)                          | (2)                                                                                                | (3)                                                                                                                                | (4)                    | (5)                                                                                                                                 | (6)                             | (7)                            |
| 80 |                              | Penyusunan aturan administrasi petugas pengawasan internal di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM | Tersedianya kualifikasi khusus terhadap petugas yang ditempatkan pada pengawasan internal                                          | Juli 2012              | Petugas pengawasan internal yang berintegritas                                                                                      | Kementerian Hukum dan HAM       |                                |
| 81 |                              | Penguatan komitmen para pihak dalam pemberantasan penyelundupan                                    | Terlaksananya <i>Memorandum of Understanding</i> antara Kementerian Keuangan dengan Badan Koordinasi Keamanan Laut                 | Juli 2012              | Pemberian peran yang memadai bagi para pihak untuk menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif dalam pemberantasan penyelundupan | Kementerian Keuangan            | Badan Koordinasi Keamanan Laut |
| 82 |                              | Penguatan fungsi supervisi dan pengendalian atas PNBP                                              | Pelaksanaan kajian mengenai organisasi di K/L yang memiliki fungsi melakukan supervisi dan mengendalikan atas PNBP pada setiap K/L | Desember 2012          | Rekomendasi kelembagaan pelaksana supervisi/pembinaan PNBP di K/L                                                                   | Kementerian PAN dan RB          | Kementerian Keuangan           |
|    |                              |                                                                                                    | Pelaksanaan kajian mengenai kebijakan dalam pengelolaan PNBP di K/L                                                                |                        | Rekomendasi kebijakan supervisi dan pengendalian PNBP yang memadai oleh K/L                                                         | Kementerian Keuangan            | Kementerian PAN dan RB         |

| No                                                                         | Isu/<br>Strategi<br>Nasional | Aksi                                                                                                                                                                                                            | Keluaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Target<br>Penyelesaian | Sasaran                                                                                                                                                           | Instansi<br>Penanggung<br>Jawab | Instansi<br>Terkait                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                                                            | (1)                          | (2)                                                                                                                                                                                                             | (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (4)                    | (5)                                                                                                                                                               | (6)                             | (7)                                                                   |
| STRATEGI PENEGAKAN HUKUM                                                   |                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                                                                                                                                                                   |                                 |                                                                       |
| Memperkuat Koordinasi Lembaga Penegak Hukum dalam Penanganan Kasus Korupsi |                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                                                                                                                                                                   |                                 |                                                                       |
| 83                                                                         |                              | Pemberantasan korupsi untuk menyelamatkan uang Negara berdasarkan prioritas                                                                                                                                     | Terpetakannya 10 (sepuluh) area kerawanan korupsi berdasarkan indikator yang telah ditetapkan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Maret 2012             | Peningkatan kualitas penindakan perkara korupsi di Lembaga Negara dan BUMN yang terfokus berdasarkan prioritas                                                    | Kejaksaan Agung                 | Kepolisian Negara Republik Indonesia, Sekjen KPK, Sekjen Ombudsman RI |
|                                                                            |                              |                                                                                                                                                                                                                 | Terlaksananya penindakan terhadap kasus korupsi berdasarkan pemetaan sektor rawan korupsi dan nilai kerugian Negara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Desember 2012          |                                                                                                                                                                   |                                 |                                                                       |
| 84                                                                         |                              | Memperkuat penanganan kasus korupsi dan mekanisme pengaduan masyarakat serta penguatan koordinasi diantara lembaga penegak hukum didukung IT yang dilaksanakan secara komprehensif ( <i>e-law enforcement</i> ) | Penguatan pelaksanaan koordinasi dan supervisi KPK bidang Penindakan dan Pencegahan, dengan keluaran (dilaksanakan di Pusat dan 33 Propinsi di Indonesia):<br>1. Supervisi penanganan tindak pidana korupsi sejumlah 128 kasus<br>2. Koordinasi penanganan tipikor 64 kasus. Peningkatan kemampuan SDM aparat penegak hukum dalam penanganan perkara TPK, melalui workshop, / bimbingan teknis. Peserta dari Polda, Kajati, BPKP, Itjen dan LSM dengan target 600 peserta | Desember 2012          | Optimalisasi fungsi koordinasi dan supervisi bidang Penindakan adalah dalam rangka meningkatkan penyelesaian perkara yang ditangani oleh Kejaksaan dan Kepolisian | Sekjen KPK                      | Sekjen Ombudsman RI                                                   |

| No | Isu/<br>Strategi<br>Nasional | Aksi                                                                                                                                                                       | Keluaran                                                                                                                                                                           | Target<br>Penyelesaian | Sasaran                                                                                                                | Instansi<br>Penanggung<br>Jawab                       | Instansi<br>Terkait                                                                                     |
|----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | (1)                          | (2)                                                                                                                                                                        | (3)                                                                                                                                                                                | (4)                    | (5)                                                                                                                    | (6)                                                   | (7)                                                                                                     |
| 85 |                              | Peningkatan koordinasi antar lembaga penegak hukum dalam setiap proses penyidikan tindak pidana korupsi                                                                    | Laporan rekapitulasi penyampaian SPDP kasus korupsi dari Kepolisian kepada Kejaksaan dan KPK serta dari Kejaksaan kepada KPK                                                       | Desember 2012          | Penanganan kasus korupsi berjalan lebih efektif                                                                        | Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung | Sekjen KPK, Sekjen Ombudsman RI                                                                         |
| 86 |                              | Pelaksanaan Peraturan Bersama lembaga penegak hukum untuk melindungi pelapor dan saksi pelaku yang bekerjasama ( <i>whistle blower</i> atau <i>justice collaborators</i> ) | Laporan Pelaksanaan Peraturan Bersama lembaga penegak hukum untuk melindungi pelapor dan saksi pelaku yang bekerjasama ( <i>whistle blower</i> atau <i>justice collaborators</i> ) | Desember 2012          | Peningkatan partisipasi pelapor dan saksi pelaku <i>whistle blower</i> yang bekerjasama untuk membantu penegakan hukum | Kejaksaan Agung                                       | Kementerian Hukum dan HAM, Kepolisian Negara Republik Indonesia , Sekjen KPK, LPSK, Sekjen Ombudsman RI |

| No                                                                             | Isu/<br>Strategi<br>Nasional | Aksi                                                                                  | Keluaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Target<br>Penyelesaian | Sasaran                                                                                                                                                                                                                                                                          | Instansi<br>Penanggung<br>Jawab      | Instansi<br>Terkait                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                                | (1)                          | (2)                                                                                   | (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (4)                    | (5)                                                                                                                                                                                                                                                                              | (6)                                  | (7)                                   |
| Penguatan dan Konsistensi Sanksi Hukum dan Administrasi terhadap Penegak Hukum |                              |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      |                                       |
| 87                                                                             |                              | Pelaksanaan penegakan hukum terkait pelanggaran yang dilakukan oleh aparat Kepolisian | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan pelaksanaan penerapan sanksi bagi pejabat dan aparat yang melakukan pelanggaran disiplin dan kode etik di Kepolisian</li> <li>- Terpublikasinya kepada masyarakat atas pelaksanaan pengenaan sanksi hukum maupun administrasi kepada pejabat dan aparat yang telah melakukan pelanggaran</li> </ul> | Desember 2012          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menurunnya tingkat pelanggaran disiplin dan kode etik serta meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap upaya penegakan hukum</li> <li>- Menurunnya jumlah pejabat dan petugas bermasalah yang dipromosikan dan dimutasikan</li> </ul> | Kepolisian Negara Republik Indonesia | Komisi Kepolisian Nasional            |
| 88                                                                             |                              | Pelaksanaan penegakan hukum terkait pelanggaran yang dilakukan oleh aparat Kejaksaan  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan pelaksanaan penerapan sanksi bagi pejabat dan aparat yang melakukan pelanggaran disiplin dan kode etik di Kejaksaan</li> <li>- Terpublikasinya kepada masyarakat atas pelaksanaan pengenaan sanksi hukum maupun administrasi kepada pejabat dan aparat yang telah melakukan pelanggaran</li> </ul>  | Desember 2012          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menurunnya tingkat pelanggaran disiplin dan kode etik serta meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap upaya penegakan hukum</li> <li>- Menurunnya jumlah pejabat dan petugas bermasalah yang dipromosikan dan dimutasikan</li> </ul> | Kejaksaan Agung                      | Komisi Kejaksaan, Sekjen Ombudsman RI |

| No                                                                                                                                                                           | Isu/<br>Strategi<br>Nasional | Aksi                                                                                                          | Keluaran                                                                                                                                                                                                                                              | Target<br>Penyelesaian         | Sasaran                                                                                                                      | Instansi<br>Penanggung<br>Jawab                                   | Instansi<br>Terkait                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                              | (1)                          | (2)                                                                                                           | (3)                                                                                                                                                                                                                                                   | (4)                            | (5)                                                                                                                          | (6)                                                               | (7)                                         |
| STRATEGI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN                                                                                                                                        |                              |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |                                                                                                                              |                                                                   |                                             |
| Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan dan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dalam Rangka Penegakan Hukum yang Modern dalam Sistem Peradilan Pidana |                              |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |                                                                                                                              |                                                                   |                                             |
| 89                                                                                                                                                                           |                              | Penyusunan peraturan perundangan-undangan dalam rangka pemberantasan korupsi                                  | Terlaksananya penguatan SPP Khusus Pemberantasan Korupsi dalam penyusunan RUU KUHP<br>Terlaksananya percepatan pengesahan RUU Tipikor sesuai Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 dan RUU Perampasan aset                                                   | Desember 2012                  | Peningkatan kualitas penegakan hukum dan penanganan perkara korupsi                                                          | Kementerian Hukum dan HAM                                         | Sekjen KPK, Sekjen Ombudsman RI             |
| 90                                                                                                                                                                           |                              | Penguatan peraturan perundangan dalam penanganan kasus korupsi di sektor publik dan sektor swasta             | Tersedianya Peraturan BUMN tentang Akuntabilitas Keuangan BUMN<br>Tersedianya Peraturan Pemerintah pelaksanaan UU KPK tentang Koordinasi dan Supervisi<br>Tersedianya Peraturan Menteri BUMN tentang Penundaan Transaksi Bisnis yang terlibat korupsi | Desember 2012<br><br>Juni 2012 | Peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja penegakan hukum dan terhadap transaksi bisnis nasional dan internasional | Kementerian BUMN<br>Kementerian Hukum dan HAM<br>Kementerian BUMN |                                             |
| 91                                                                                                                                                                           |                              | Pelaksanaan harmonisasi peraturan yang terkait dengan hukum acara dalam rangka penegakan hukum dan penanganan | Tersedianya peraturan terkait penanganan perkara dan penegakan hukum dalam sistem peradilan modern di Kepolisian                                                                                                                                      | Agustus 2012                   | Peningkatan kualitas penyelenggaraan penegakan hukum dan penanganan perkara dalam sistem peradilan yang modern               | Kepolisian Negara Republik Indonesia                              | Kejaksaan Agung, Komisi Kepolisian Nasional |

| No | Isu/<br>Strategi<br>Nasional | Aksi                                                                                                                                                                               | Keluaran                                                                                                                    | Target<br>Penyelesaian | Sasaran                                                                                                                                                                      | Instansi<br>Penanggung<br>Jawab | Instansi<br>Terkait |
|----|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|
|    | (1)                          | (2)                                                                                                                                                                                | (3)                                                                                                                         | (4)                    | (5)                                                                                                                                                                          | (6)                             | (7)                 |
|    |                              | perkara dalam sistem peradilan di Kepolisian                                                                                                                                       |                                                                                                                             |                        |                                                                                                                                                                              |                                 |                     |
| 92 |                              | Penguatan dukungan lembaga peradilan dalam proses harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan dalam rangka penegakan hukum yang modern dalam sistem peradilan pidana | Tersedianya produk hukum MA mengenai tugas dan fungsi lembaga peradilan dalam mendukung sistem peradilan pidana yang modern | September 2012         | Peningkatan kualitas mekanisme dan koordinasi yang mendukung pelaksanaan koordinasi penegakan hukum diantara lembaga penegak hukum dalam sistem peradilan pidana yang modern | Sekretariat MA                  | POLRI, Kejaksaan    |
| 93 |                              | Pengaturan implementasi UU tentang Transfer Dana                                                                                                                                   | Kajian bersama Menkeu-BI tentang pembatasan transaksi tunai                                                                 | Desember 2012          | Pembatasan transaksi tunai yang mempersempit peluang terjadinya tindak pidana korupsi                                                                                        | Kementerian Keuangan            | BI                  |



| No                                                                                                                                                             | Isu/<br>Strategi<br>Nasional | Aksi                                                                                                                | Keluaran                                                                                                                                                                                                                                                         | Target<br>Penyelesaian | Sasaran                                                                                                                    | Instansi<br>Penanggung<br>Jawab | Instansi<br>Terkait                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                | (1)                          | (2)                                                                                                                 | (3)                                                                                                                                                                                                                                                              | (4)                    | (5)                                                                                                                        | (6)                             | (7)                                                                                                                                |
| STRATEGI KERJASAMA INTERNASIONAL DAN PENYELAMATAN ASET                                                                                                         |                              |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                                                                                                                            |                                 |                                                                                                                                    |
| Memastikan Lembaga Pelaksana <i>Central of Authority</i> untuk Tipikor                                                                                         |                              |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                                                                                                                            |                                 |                                                                                                                                    |
| 94                                                                                                                                                             |                              | Penguatan Pusat Pengendali pelaksanaan sesuai UU No. 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana | Evaluasi dan database mengenai upaya-upaya kerjasama internasional (MLA) dan laporan keberhasilan kerjasama internasional yang pernah dilakukan dalam rangka penyusunan peraturan tentang pusat pengendalian untuk kerjasama internasional pemberantasan korupsi | Desember 2012          | Efektifitas peran <i>Central of Authority</i> dalam rangka kerjasama internasional dalam masalah pidana (MLA)              | Kementerian Hukum dan HAM       | Kemenko Polhukam, Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Sekjen KPK, Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri |
|                                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                     | Terbitnya peraturan tentang Pusat Pengendali Kerjasama Internasional Pemberantasan Korupsi                                                                                                                                                                       | Desember 2012          |                                                                                                                            |                                 |                                                                                                                                    |
| Memastikan Pembentukan Lembaga Pengelolaan Aset Hasil Tipikor (AMU) dengan Tujuan untuk Mendukung Proses Penegakan Hukum, Proses Transparansi Pengelolaan Aset |                              |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                                                                                                                            |                                 |                                                                                                                                    |
| 95                                                                                                                                                             |                              | Percepatan Penyusunan Perpres tentang Pembentukan lembaga Pengelola Aset                                            | Penyusunan mekanisme pengembalian aset hasil tipikor berdasarkan kebutuhan dalam praktek pengembalian aset                                                                                                                                                       | Desember 2012          | Efesiensi pengelolaan aset dan distribusi serta pemanfaatan hasil korupsi bagi penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi | Kementerian Hukum dan HAM       | Kementerian Keuangan, Sekretariat Kabinet                                                                                          |

| No                                                                        | Isu/<br>Strategi<br>Nasional | Aksi                                                                                                                                                                                                                                                                        | Keluaran                                                                                                                                                                                                                                           | Target<br>Penyelesaian | Sasaran                                                                                                                                     | Instansi<br>Penanggung<br>Jawab                    | Instansi<br>Terkait                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                           | (1)                          | (2)                                                                                                                                                                                                                                                                         | (3)                                                                                                                                                                                                                                                | (4)                    | (5)                                                                                                                                         | (6)                                                | (7)                                                                                                                                                |
| 96                                                                        |                              | Dukungan lembaga peradilan dalam proses penyelamatan aset hasil korupsi                                                                                                                                                                                                     | Tersedianya mekanisme/SOP penanganan penyelamatan aset hasil korupsi yang akuntabel dan transparan                                                                                                                                                 | Oktober 2012           | Peningkatan percepatan proses penanganan perkara korupsi dan proses penyelamatan aset hasil korupsi                                         | Sekretariat MA                                     | Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Sekjen KPK, Kementerian Keuangan                                 |
| Pelatihan dan Bantuan Teknik dalam rangka Penyelamatan Aset Hasil Korupsi |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                                                                    |
| 97                                                                        |                              | Memantapkan koordinasi peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan aparat terkait lainnya dalam rangka penyelamatan aset hasil korupsi ( <i>asset freezing, asset seizure, asset forfeiture, forensic accounting/audit forensik, mekanisme Mutual Legal Assistance</i> ) | Terlaksananya koordinasi pelatihan berkala maupun <i>ad-hoc</i> di lingkungan aparat penegak hukum:<br>a. Jumlah Pelatihan berkala di masing-masing K/L<br>b. Jumlah pelatihan bersama antar penegak hukum terkait penyelamatan aset hasil korupsi | Desember 2012          | Peningkatan pemahaman aparat penegak hukum dan aparat lembaga terkait lainnya dalam mekanisme pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi | Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan | Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Sekjen KPK, Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, PPATK |

| No                                              | Isu/<br>Strategi<br>Nasional | Aksi                                                                                                                                                                                             | Keluaran                                                                                                                    | Target<br>Penyelesaian | Sasaran                                                                        | Instansi<br>Penanggung<br>Jawab                    | Instansi<br>Terkait                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 | (1)                          | (2)                                                                                                                                                                                              | (3)                                                                                                                         | (4)                    | (5)                                                                            | (6)                                                | (7)                                                                                                                                   |
| 98                                              |                              | Pelatihan dan Bantuan Teknik dalam rangka penyelamatan aset hasil korupsi bagi hakim                                                                                                             | Tersedianya sumber daya hakim yang memiliki kompetensi yang mendukung upaya penegakan hukum di bidang pemberantasan korupsi | Desember 2012          | Peningkatan kapasitas hakim dalam proses penegakan hukum                       | Sekretariat MA                                     |                                                                                                                                       |
| Pembentukan <i>Task Force</i> Penyelamatan Aset |                              |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                        |                                                                                |                                                    |                                                                                                                                       |
| 99                                              |                              | Memantapkan koordinasi intensif antar lembaga yang memiliki kompetensi dalam mengembalikan aset hasil tipikor (baik di dalam negeri maupun luar negeri) guna menyusun strategi pengembalian aset | Terlaksananya koordinasi pengembalian aset hasil tipikor                                                                    | Desember 2012          | Peningkatan jumlah aset hasil tindak pidana korupsi yang berhasil diselamatkan | Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan | Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Sekretariat MA, Sekjen KPK |

| No                                          | Isu/<br>Strategi<br>Nasional | Aksi                                                                                                                   | Keluaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Target<br>Penyelesaian | Sasaran                                                                                                                                                                                | Instansi<br>Penanggung<br>Jawab        | Instansi<br>Terkait                                                                                                          |
|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | (1)                          | (2)                                                                                                                    | (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (4)                    | (5)                                                                                                                                                                                    | (6)                                    | (7)                                                                                                                          |
| 100                                         |                              | Penuntasan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dalam penyelamatan aset hasil tipikor                             | Laporan perkembangan capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Desember 2012          | Peningkatan jumlah kasus dan nominal penyelamatan aset dari hasil tipikor                                                                                                              | Kementerian Hukum dan HAM              | Kementerian Luar Negeri, Kemenko Polhukam, Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Sekretariat MA, Sekjen KPK |
| STRATEGI PENDIDIKAN DAN BUDAYA ANTI KORUPSI |                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                                                                                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                              |
| Kampanye Anti Korupsi                       |                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                                                                                                                                                                                        |                                        |                                                                                                                              |
| 101                                         |                              | Pelaksanaan sosialisasi kebijakan publik terkait upaya percepatan pencegahan dan pemberantasan korupsi di badan publik | Terlaksananya kegiatan sosialisasi mengenai kebijakan anti-korupsi, antara lain: <i>whistle blower system</i> , <i>justice collaborator</i> , dan kewajiban LHKPN melalui media komunikasi dan membangun tingkat kesadaran anti korupsi bagi badan publik, kalangan pengusaha, kelompok strategis masyarakat (mahasiswa, guru, LSM, dll) | Desember 2012          | Meningkatnya kesadaran para penyelenggara di badan publik untuk menjalankan birokrasi yang bersih dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan badan publik | Kementerian Komunikasi dan Informatika | Sekjen KPK, Sekjen Ombudsman RI                                                                                              |

| No                                                                                                                                                | Isu/<br>Strategi<br>Nasional | Aksi                                                                                                       | Keluaran                                                                                                                                                                                 | Target<br>Penyelesaian | Sasaran                                                                                               | Instansi<br>Penanggung<br>Jawab            | Instansi<br>Terkait                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                   | (1)                          | (2)                                                                                                        | (3)                                                                                                                                                                                      | (4)                    | (5)                                                                                                   | (6)                                        | (7)                                                                               |
| 102                                                                                                                                               |                              | Pelaksanaan sosialisasi dan kampanye massal budaya anti korupsi                                            | Tersusunnya cetak biru strategi komunikasi pendidikan dan budaya anti korupsi                                                                                                            | Juni 2012              | Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat luas mengenai nilai, budaya dan perilaku anti korupsi | Kementerian Komunikasi dan Informatika     | Sekjen KPK, Sekjen Ombudsman RI Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian PAN dan RB |
|                                                                                                                                                   |                              |                                                                                                            | Terlaksananya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat luas antara lain mengenai peran pencegahan dan pemberantasan korupsi, jenis perilaku koruptif, dan nilai-nilai anti korupsi lainnya | Desember 2012          |                                                                                                       |                                            |                                                                                   |
|                                                                                                                                                   |                              |                                                                                                            | Terlaksananya kampanye anti-korupsi melalui pengembangan produk kreatif (seni musik, seni pertunjukan dan perfilman) yang mendukung semangat anti-korupsi                                | Desember 2012          | Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat luas mengenai nilai, budaya dan perilaku anti korupsi | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |                                                                                   |
|                                                                                                                                                   |                              |                                                                                                            | Terlaksananya kampanye pemuda anti-korupsi diantaranya melalui pramuka, paskibra dan kegiatan olahraga                                                                                   | Desember 2012          |                                                                                                       | Kementerian Pemuda dan Olahraga            |                                                                                   |
| Pengembangan Nilai-Nilai Anti Korupsi dalam Berbagai Aktivitas di Sekolah dan Lingkup Sosial untuk Menciptakan Karakter Bangsa yang Berintegritas |                              |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                          |                        |                                                                                                       |                                            |                                                                                   |
| 103                                                                                                                                               |                              | Pengajaran anti-korupsi sebagai sisipan dalam kurikulum karakter bangsa pada pendidikan dasar dan menengah | Tersedianya modul ajar anti-korupsi yang siap disisipkan untuk pendidikan dasar dan menengah                                                                                             | April 2012             | Pengintegrasian nilai anti-korupsi dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah                      | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan      | Sekjen KPK, Sekjen Ombudsman RI                                                   |

| No                                                                                                                                        | Isu/<br>Strategi<br>Nasional | Aksi                                                                               | Keluaran                                                                         | Target<br>Penyelesaian                         | Sasaran                                                                                                                               | Instansi<br>Penanggung<br>Jawab       | Instansi<br>Terkait                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                           | (1)                          | (2)                                                                                | (3)                                                                              | (4)                                            | (5)                                                                                                                                   | (6)                                   | (7)                                                                          |
|                                                                                                                                           |                              |                                                                                    | Persentase sosialisasi dan <i>training of trainers</i> modul anti-korupsi        | Desember 2012                                  |                                                                                                                                       |                                       |                                                                              |
|                                                                                                                                           |                              |                                                                                    | Jumlah uji coba penerapan modul anti-korupsi di sekolah dasar dan menengah       | Desember 2012                                  |                                                                                                                                       |                                       |                                                                              |
| 104                                                                                                                                       |                              | Pengembangan pendidikan anti-korupsi pada pendidikan tinggi                        | Tersedianya modul ajar anti-korupsi yang siap disisipkan untuk pendidikan tinggi | April 2012                                     | Pengintegrasian nilai anti-korupsi dalam kurikulum pendidikan tinggi                                                                  | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | Sekjen KPK, Sekjen Ombudsman RI                                              |
|                                                                                                                                           |                              |                                                                                    | Persentase sosialisasi dan <i>training of trainers</i> modul anti-korupsi        | Desember 2012                                  |                                                                                                                                       |                                       |                                                                              |
|                                                                                                                                           |                              |                                                                                    | Jumlah uji coba penerapan modul anti-korupsi pada perguruan tinggi               | Desember 2012                                  |                                                                                                                                       |                                       |                                                                              |
| STRATEGI MEKANISME PELAPORAN                                                                                                              |                              |                                                                                    |                                                                                  |                                                |                                                                                                                                       |                                       |                                                                              |
| Memperluas dan Mempermudah Akses Informasi Berbagai Upaya dalam rangka Proses Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dari Masing-masing K/L |                              |                                                                                    |                                                                                  |                                                |                                                                                                                                       |                                       |                                                                              |
| 105                                                                                                                                       |                              | Penyusunan laporan pelaksanaan implementasi Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 (UNCAC) | Laporan implementasi UNCAC di Indonesia pada Konferensi Negara Pihak UNCAC       | Setiap 2 (dua) tahun sekali (pelaksanaan CoSP) | Tersusunnya laporan pencegahan dan pemberantasan korupsi nasional sebagai bentuk pelaporan pemerintah dalam mengimplementasikan UNCAC | Kementerian Luar Negeri, Sekjen KPK   | Kementerian PAN dan RB, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Hukum dan HAM, |

| No  | Isu/<br>Strategi<br>Nasional | Aksi                                                                                        | Keluaran                                                             | Target<br>Penyelesaian | Sasaran                                                                           | Instansi<br>Penanggung<br>Jawab | Instansi<br>Terkait                                                                                                                                                                               |
|-----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | (1)                          | (2)                                                                                         | (3)                                                                  | (4)                    | (5)                                                                               | (6)                             | (7)                                                                                                                                                                                               |
|     |                              |                                                                                             |                                                                      |                        |                                                                                   |                                 | Kementerian<br>Keuangan,<br>Kementerian<br>Luar Negeri,<br>Kementerian<br>Dalam Negeri,<br>PPATK,<br>Kejaksaan<br>Agung,<br>Kepolisian<br>Negara Republik<br>Indonesia,<br>Komisi<br>Ombudsman RI |
| 106 |                              | Penyusunan laporan tahunan terintegrasi mengenai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi | Laporan tahunan Pencegahan dan pemberantasan korupsi kepada Presiden | Desember 2012          | Peningkatan kualitas laporan Pencegahan dan pemberantasan korupsi secara nasional | Sekjen KPK                      | Kementerian PAN dan RB, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri,                                                                       |

| No | Isu/<br>Strategi<br>Nasional | Aksi | Keluaran | Target<br>Penyelesaian | Sasaran | Instansi<br>Penanggung<br>Jawab | Instansi<br>Terkait                                                                                                                    |
|----|------------------------------|------|----------|------------------------|---------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | (1)                          | (2)  | (3)      | (4)                    | (5)     | (6)                             | (7)                                                                                                                                    |
|    |                              |      |          |                        |         |                                 | Kementerian<br>Dalam Negeri,<br>PPATK,<br>Kejaksaan<br>Agung,<br>Kepolisian<br>Negara Republik<br>Indonesia,<br>Sekjen<br>Ombudsman RI |

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KABINET RI  
Asisten Deputi Bidang Perancangan Perundang-undangan  
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan,

M. Rokib